



**PERAN KERAPATAN ADAT NAGARI DALAM PEMERINTAHAN
OTONOM DI NAGARI PANYAKALAN KECAMATAN
KUBUNG KABUPATEN SOLOK PROVINSI
SUMATERA BARAT**

SKRIPSI

*Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mengikuti Ujian Skripsi
Pada Fakultas Ekonomi Dan Ilmu Sosial
Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau*

OLEH

NOFRAN WAHYUDA PUTERA
NIM : 11675101397



**PROGRAM S1
JURUSAN ADMINISTRASI NEGARA
FAKULTAS EKONOMI DAN ILMU SOSIAL
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
PEKANBARU
2020**

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI

Nama : Nofran Wahyuda Putera
 Nim : 11675101397
 Jurusan : Administrasi Negara
 Fakultas : Ekonomi Dan Ilmu Sosial
 Judul Skripsi : Peran Kerapatan Adat Nagari Dalam Pemerintahan Otonom Di
 Nagari Panyakalan Kecamatan Kubung Kabupaten Solok
 Provinsi Sumatera Barat

Disetujui oleh,

Dosen Pembimbing

Dr. Kamaruddin. S.Sos M.Si

NIP. 19790101 200710 1 003

Mengetahui,

Dekan
 Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial



Dr. Dzulhikmah. Sa'id HM, M.Ag, MM

NIP. 19620512 198903 1 003

Ketua Jurusan
 Administrasi Negara

Dr. Kamaruddin. S.Sos M.Si

NIP. 19790101 200710 1 003

UIN SUSKA RIAU


**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.


LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI

Nama : Nofran Wahyuda Putera
 Nim : 11675101397
 Jurusan : Administrasi Negara
 Fakultas : Ekonomi Dan Ilmu Sosial
 Judul Skripsi : Peran Kerapatan Adat Nagari Dalam Pemerintahan
 Otonom Di Nagari Panyakalan Kecamatan Kubung
 Kabupaten Solok Provinsi Sumatera Barat
 Tanggal Ujian : 20 Juli 2020


Disetujui oleh,
 Ketua Penguji


Dr. Kamaruddin, S.Sos M.Si
 NIP. 19790101 200710 1 003

Penguji I


Dr. Hj. Sitti Rahmah, M.Si
 NIP. 19640508 199303 2 002

Penguji II


M. Rafi, S.Sos, M.Si
 NIK. 130 717 059

UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ABSTRAK

PERAN KERAPATAN ADAT NAGARI DALAM PEMERINTAHAN OTONOM DINAGARI PANYAKALAN, KECAMATAN KUBUNG, KABUPATEN SOLOK, PROVINSI SUMATERA BARAT

Oleh :

Nofran Wahyuda Putera

Penelitian ini dilaksanakan di Pemerintahan Nagari Panyakalan, Kecamatan Kubung, Kabupaten Solok, Sumatera Barat. Kerapatan Adat Nagari merupakan lembaga permusyawaratan tertinggi dalam nagari yang keanggotaan terdiri dari mnik mamak dalam nagari. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah : 1) Untuk mengetahui bagaimana peran kerapatan adat nagari dalam pemerintahan otonom dinagari Panyakalan. 2) Untuk mengetahui kendala yang di alami oleh kerapata adat nagari dalam penyelenggaraan pemerintahan. Penelitian ini menggunakan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat No 7 Tahun 2018 Tentang Nagari. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Berdasarkan hasil wawancara, dokumentasi dan observasi dilapangan dapat disimpulkan bahwa KAN dalam menjalankan tugas dan wewenangnya dalam pemerintahan nagari belum sepenuhnya dijalankan. Jadi menyebabkan peran nya dalam pemerintahan nagari belum optimal atau terlaksana dengan baik. KAN seharusnya menjalankan tugas dan wewenang nya dengan baik sehingga perannya dipemerintahan nagari terlaksana dengan baik dan pemerintah Kab. Solok harus segera mensosialisasikan PERDA SUMBAR No 7 Tahun 2018.

Kata Kunci : Peran, Kerapatan Adat Nagari, Pemerintahan Nagari

UIN SUSKA RIAU



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

KATA PENGANTAR



Assalamualaikum Wr. Wb

Alhamdulillah Robbil'alam, puji syukur kehadiran ALLAH SWT yang telah melimpahkan rahmat dan karunianya kepada penyusun sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul **“PERAN KERAPATAN ADAT NAGARI DALAM PEMERINTAHAN OTONOM DI NAGARI PANYAKALAN KECAMATAN KUBUNG KABUPATEN SOLOK PROVINSI SUMATERA BARAT”**. Selanjutnya shalawat serta salam senantiasa sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW yang senantiasa dirindukan wajah dan syafaatnya dihari akhir kelak.

Penulisan skripsi ini diperuntukkan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana Strata (S1) Pada Program Studi Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Dalam penulisan skripsi ini penulis menyadari bahwa masih banyak kelemahan dan kekurangan yang disebabkan oleh keterbatasan pengetahuan dan pengalaman penyusun. Namun banyak pihak yang mendorong dan memberikan motivasi bagi penyusun sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini.

Teristimewa kepada Kedua Orang Tua Ibunda tercinta Yusnawati dan Ayahanda Alm. Syamsul Huda, terima kasih telah merawat, membesarkan, membimbing dan selalu memberikan semangat dengan penuh pengorbanan baik secara moril maupun materil dan selalu mendoakan ananda untuk dapat



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

mewujudkan cita-cita hingga menjadi seorang sarjana sungguh mulia pengorbanan kedua orang tua. Dengan penuh kesabaran, ketabahan, kasih sayang, doa serta dukungan untuk keberhasilan ananda hingga saat ini, untuk itu skripsi ini dipersembahkan untuk kedua orang tua ananda yang sangat ananda sayangi.

Pada kesempatan ini dengan kerendahan hati dan penuh dengan rasa hormat penyusun mengucapkan terima kasih kepada :

1. Bapak Prof. Dr. H. Akhmad Mujahidin, S.Ag, M.Ag selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
2. Bapak Dr. Drs. H. Muh Said, HM. M.Ag, MM selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
3. Bapak Dr. Kamaruddin, S.Sos, M.Si selaku Ketua Program Studi Administrasi Negara Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau dan selaku dosen konsultasi dan dosen pembimbing yang memberikan bimbingan, informasi serta arahan kepada penulis selama menyelesaikan proposal dan skripsi ini hingga selesai.
4. Bapak Jhon Afrizal, S.HI, MA selaku Sekretaris Program Studi Administrasi Negara Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
- Bapak Drs, Almasri, M.Si selaku Pembimbing Akademik.
- Bapak dan Ibu Dosen serta pegawai di Program Studi Administrasi Negara sebagai inspirasi penulis menjadi manusia yang memiliki ilmu yang baik dan bernilai.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Untuk keluarga besar di Solok terima kasih telah memberikan perhatian, motivasi, dukungan, dan doa yang membuat peneliti terus semangat dalam menyelesaikan skripsi ini.

Untuk kakak Suliya Gusna Haida, S.Pd dan Beny Andromeda, SE, serta untuk keponakan Dafina Cahya Khairani terima kasih atas dukungan, semangat serta motivasinya.

Untuk Keluarga Besar Administrasi D 2016 di Pekanbaru yang memberikan semangat, dukungan dan doa selama menyelesaikan skripsi ini.

10. Untuk Keluarga Besar Administrasi Negara Angkatan 2016 yang memberikan semangat, dukungan dan doa selama menyelesaikan skripsi ini.

11. Untuk keluarga 2020 S.Sos di Pekanbaru yaitu Pratami Eka Putri, Ria Mardiyanti, Bobby Frizia Aziz, Rifaldi, Agus Riadi, Dandy Julika, Hafifah Harashta, Restu Adi Pratama, Wahyudi Jamal, dan Hafiz Kemurata An Nawawi yang selalu semangat dan kerjasamanya dalam menyelesaikan skripsi ini.

Untuk Mesi Indriyanti, Siti Nadaria, Dio Akbar Alghifari, Widyatul Adawiyah, Nur Fadhilah dan Diah Nurhidayah kawan sepembimbingan dan seperjuangan dalam pembuatan skripsi yang selalu memberi semangat dan membantu penulis untuk menyelesaikan skripsi ini.

Kepada Keluarga Besar Himpunan Mahasiswa Jurusan Ilmu Administrasi Negara (HMJ-ANA) Periode 2018-2019.

Kepada Keluarga Besar KKN Desa Sungai Siput, Kecamatan Siak Kecil, Kabupaten Bengkalis Tahun 2019



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

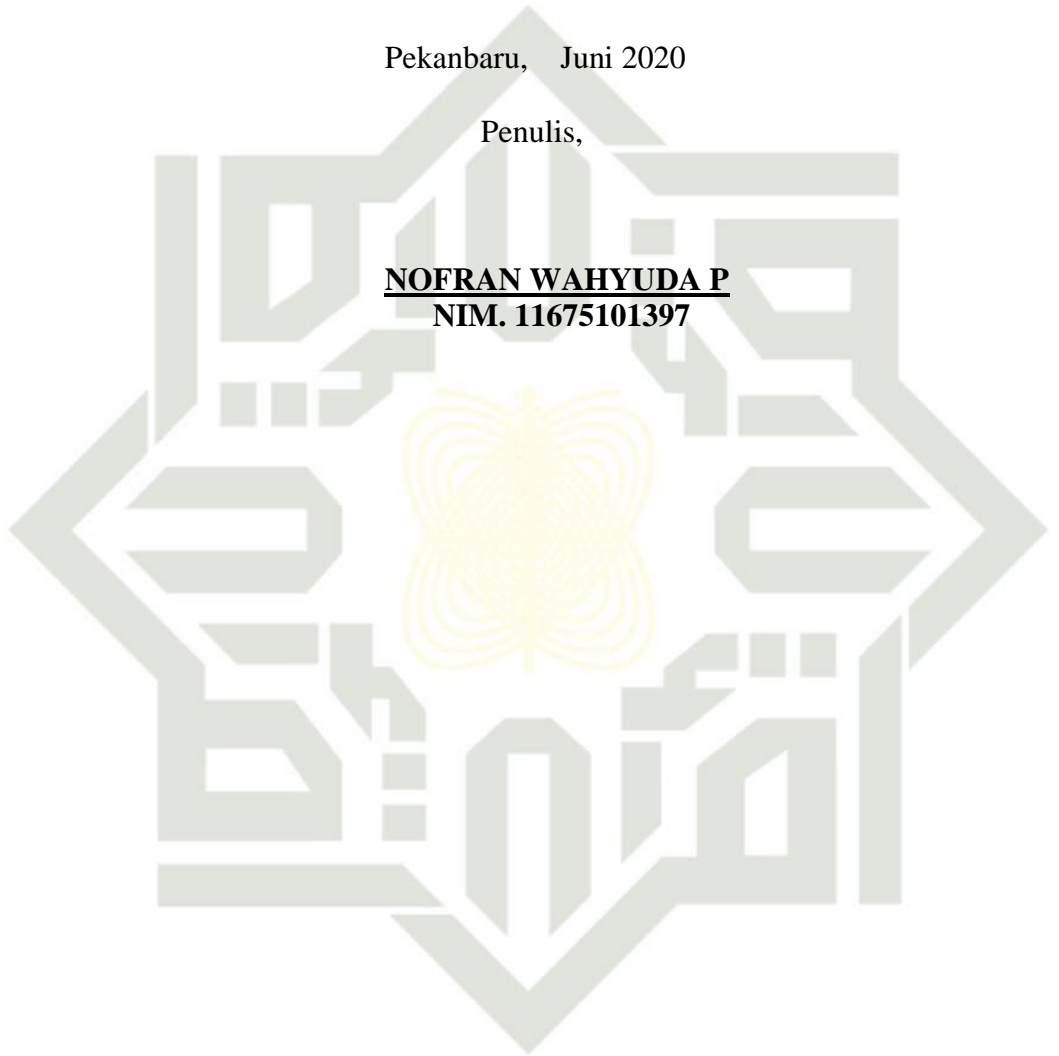
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Semoga semua motivasi, semangat, do'a serta bantuan yang telah diberikan mendapatkan imbalan dari ALLAH SWT. Penulis berharap semoga karya tulis ini dapat bermanfaat. *Amin amin yarobal alamin.*

Pekanbaru, Juni 2020

Penulis,

NOFRAN WAHYUDA P
NIM. 11675101397



UIN SUSKA RIAU



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	vi
DAFTAR TABEL	ix
DAFTAR GAMBAR	x
BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang Masalah	1
1.2 Rumusan Masalah.....	7
1.3 Tujuan Penulisan	7
1.4 Manfaat Penelitian.....	8
1.5 Sistematika Penulisan.....	8
BAB II LANDASAN TEORI	
2.1 Pemerintah Daerah	10
2.2 Otonomi Daerah.....	12
2.2.1 Pengertian Otonomi Daerah.....	12
2.2.2 Asas-Asas Otonomi Daerah.....	14
2.2.3 Ujian Otonomi Daerah.....	16
2.3 Peran	17
2.4 Desa	18
2.4.1 Pengertian Desa	18
2.4.2 Struktur Pemerintah Desa.....	22
2.5 Nagari	23
2.5.1 Pengertian Nagari	23
2.5.2 Struktur Pemerintahan.....	24
2.5.3 Kedudukan Nagari Dalam Sistem Pemerintahan Indonesia.....	25
2.6 Kerapatan Adat Nagari	25
2.6.1 Pengertian	25
2.6.2 Tugas Kerapatan Adat Nagari	27

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2.6.3 Wewenang Kerapatan Adat Nagari	29
2.7 Perspektif islam	32
2.8 Defenisi Konsep.....	34
2.9 Penelitian terdahulu	35
2.10. Kerangka Pemikiran	37
2.11. Indikator.....	37
BAB III METODOLOGI PENELITIAN	
3.1 Lokasi dan Waktu Penelitian.....	39
3.2 Jenis Penelitian	39
3.3 Sumber Data	39
3.4 Informan Penelitian	40
3.5 Teknik Pengumpulan Data	40
3.6 Analisis Data.....	41
BAB IV KETENTUAN UMUM	
4.1 Kondisi Geografis Nagari Panyakalan	43
4.2 Sejarah Nagari	44
4.2.1 Asal Usul/Legend Nagari	44
4.2.2 Sejarah Pemerintahan Nagari	44
4.3 Gambaran Demografi Nagari Panyakalan	45
4.4 Sistem Mata Pencarian Masyarakat Nagari Panyakalan	45
4.5 Agama dan Religi Masyarakat Nagari Panyakalan	46
4.6 Suku Bangsa di Nagari Panyakalan	46
4.7 Kesenian	47
4.8 Sistem Teknologi	47
4.9 Organisasi Sosial Masyarakat Nagari Panyakalan	48
4.10 Peta Nagari Panyakalan	49
4.11 Sejarah KAN Panyakalan	49
4.12 Keanggotaan KAN Panyakalan	56

BAB V HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

- 5.1 Peran Kerapatan Adat (KAN) Nagari Panyakalan Dalam Pemerintahan Otonom di Nagari Panyakalan Kecamatan



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Kubung Kabupaten Solok Provinsi Sumatera Barat	54
5.1.1 Tugas Kerapatan Adat Nagari	54
5.1.2 Wewenang Kerapatan Adat Nagari	63
5.2 Kendala Yang Dialami oleh Kerapatan Adat Nagari dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Nagari	75
5.3 Peran KAN dalam nagari Panyakalan Menurut Masyarakat..	76
BAB VI KASIMPULAN DAN SARAN	
6.1 Kesimpulan	79
6.2 Saran	79
DAFTAR PUSTAKA	80

LAMPIRAN

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	Tugas dan Wewenang Kerapatan Adat Nagari	5
Tabel 2.1	Penelitian Terdahulu	35
Tabel 2.2	Indikator	37
Tabel 3.1	Key Informan Penelitian	40
Tabel 4.1	Geografis Nagari Panyakalan.....	43
Tabel 4.2	Sejarah Pemerintahan Nagari Panyakalan	44
Tabel 4.3	Data Penduduk Nagari Panyakalan.....	45
Tabel 4.4	Mata Pencarian Masyarakat Nagari Panyakalan.....	45
Tabel 4.5	Data Agama Masyarakat Nagari Panyakalan	46
Tabel 5.1	Tugas dan Wewenang Kerapatan Adat Nagari	54
Tabel 5.2	Data Anggaran Untuk KAN Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari Panyakalan	74



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1	Kerangka Pemikiran	37
Gambar 4.1	Peta Nagari Panyakalan	49
Gambar 4.2	Keanggotaan KAN.....	52
Gambar 4.3	Keanggotaan KAN.....	52
Gambar 4.4	Keanggotaan KAN.....	53
Gambar 5.1	Foto absen rapat penetapan APBN Panyakalan.....	62

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB I PENDAHULUAN

Latar Belakang

Lahirnya Undang-Undang No 22 Tahun 1999 tentang Otonomi Daerah di Indonesia telah membawa perubahan didalam sistem pemerintahan Indonesia. Dimana sebelum lahirnya Undang-Undang No. 22 tahun 1999 tersebut sistem pemerintahan Indonesia menganut sistem sentralisasi yang mana seluruh urusan dan keputusan diselesaikan dipusat. Tapi dengan lahirnya Undang-Undang No 22 tahun 1999 telah merubah sistem sentralisasi tersebut ke sistem desentralisasi yang mana segala urusan dan keputusan diserahkan ke daerah.

Undang-Undang No 22 tahun 1999 tentang Otonomi daerah digantikan dengan Undang-Undang No 32 tahun 2004 tentang pemerintahan daerah. Undang-Undang No 32 Tahun 2004 digantikan dengan Undang-Undang No 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah masih dipakai dalam acuan hukum untuk otonomi daerah.

Otonomi daerah sebagai konsep dasar bermakna pemerintah dalam hal ini pemerintah pusat memberikan/menyerahkan kewenangannya kepada pemerintah yang ada di daerah-daerah untuk mengatur urusan rumah tangganya secara mandiri tanpa adanya campur tangan pemerintah pusat dalam menanganinya. Dalam otonomi daerah tidak ada wewenang pemerintah pusat di daerah Kabupaten maupun Kota kecuali dalam bidang keuangan dan moneter, pertahanan keamanan, peradilan, politik luar negeri dan agama.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Otonomi daerah menuntut masing-masing daerah untuk kreatif dalam menentukan langkah-langkah dan kebijakan-kebijakan yang diambil demi membangun kehidupan masyarakat seperti apa yang mereka cita-citakan. Jika daerah tidak bisa mandiri dan kreatif dalam otonomi daerah, tidak menutup kemungkinan mereka akan terpuruk lantaran tujuan pelaksanaan dari otonomi daerah tidak mampu mereka merealisasikan. Salah satu penunjang keberhasilan dari otonomi daerah adalah terletak sejauh mana pemerintah daerah mampu berupaya untuk mengembangkan potensi yang ada agar bisa optimal demi kemajuan daerah mereka. Tujuan yang ingin dicapai dalam pelaksanaan otonomi daerah di Indonesia adalah terwujudnya peningkatan indeks pembangunan manusia sebagai indikator peningkatan kesejahteraan masyarakat Indonesia.

Pada Undang-Undang No 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah memberika kewenangan kepada pemerintah desa untuk megurusi pemerintahannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan kepada desa. Kewenangan yang dimiliki desa dalam Undang-Undang NO 6 tahun 2014 tentang desa. Kewenangan yang dimaksud meliputi kewenanga dibidang penyelenggaraan pemerintaha desa, pelaksanaan pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat desa. Pendanaan untuk menjalankan kewenangan tersebut bersumber dari APBN dan APBD daerah masing-masing.

Desa merupakan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Berbeda dengan daerah lain untuk penyebutan desa di Sumatera Barat adalah Nagari. Pengakuan nagari sebagai kesatuan masyarakat hukum adat terdapat pada pasal 18 B ayat 2 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang berbunyi “ Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam Undang-Undang.

Istilah nagari merupakan penyebutan lain desa diminangkabau. Hal ini sebagai mana yang dimaksud dalam pasal 6 ayat (2) Undang-Undang No 6 tahun 2014 tentang Desa yang menyatakan bahwa penyebutan desa/desa adat yang sebagaimana dimaksud ayat (1) penyebutannya berlaku didaerah setempat. Berdasarkan pasal 1 ayat (2) Peraturan daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 tahun 2018 tentang Nagari, menjelaskan bahwa nagari it merupakan kesatuan masyarakat hukum adat secara geneologis dan historis memiliki batas-batas dalam wilayah tertentu, memiliki harta kekayaan sendiri, berwenang memilih pemimpinnya secara musyawarah serta mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan filosofi dan sandi adat “ Adat basandi syara’, syara’ basandi kitabullah” dan/atau berdasarkan asal usul dan adat isitiadat setempat dalam wilayah Provinsi Sumatera Barat.

Pada masa penjajahan Belanda, system kerajaan sudah tidak ada lagi namun pemerintahan nagari tetap dipertahankan. Pada masa pemerintahan colonial ini mengubah tatanan pemerintah nagari agar mendukung pemerintahan colonial. Jadi, disini pemerintah nagari dituntut untuk lebih mendukung kepada

pemerintahan colonial. Pada masa orde lama system demokrasi dalam nagari mencapai titik terendah. Ini berpangkal dari Maklumat Presiden No. 22 tahun 1946 yang menyatakan bahwa struktur lembaga nagari terdiri dari Wali Nagari, Dewan Perwakilan Rakyat Nagari (DPRN) dan Dewan Harian Nagari. Wali nagari menjadi penguasa tunggal dalam nagari karena ia juga sekaligus sebagai pemimpin DPRN dan DHN. Berdasarkan SK Gubernur No.50/GP/1950, selanjutnya nagari dihapuskan dan diganti dengan pemerintahan wilayah. Konferensi niniak mamak/pemangku adat tahun 1953 di Bukittinggi memutuskan agar pemerintahan nagari dikembalikan. Hasilnya dengan SK Presiden RI dan melalui SK Mendagri tanggal 7 februari 1954, system pemerintahan nagari dihidupkan kembali. Pemberlakuan Undang-Undang No. 5 tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa pada masa orde baru membuat istilah Nagari hilang dari kehidupan rakyat minangkabau. Pada masa reformasi dengan ditetapkan Undang-Undang No.22 tahun 1999 di wilayah Sumatera Barat kembali diterapkan system pemerintahan nagari sebagai unit pemerintahan terendah yang diatur dengan Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Sumatera Barat No. 9 tahun 2000 tentang Ketentuan Pokok Pemerintahan Nagari.

Dalam nagari terdapat tiga kelembagaan yaitu: Pemerintahan Nagari, Kerapatan Adat Nagari, dan Peradilan Nagari. Kerapatan adat nagari merupakan perwujudan permusyawaratan perwakilan tertinggi dalam penyelenggaraan pemerintahan nagari yang keanggotaannya terdiri dari perwakilan ninik mamak dan unsur alim ulama nagari, bundo kanduang dan unsur parik paga dalam nagari yang bersangkutan sesuai dengan adat salangka nagari. Disini kerapatan adat nagari dianggap lembaga permusyawaratan tertinggi dalam nagari.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 tahun 2018 tentang nagari menjelaskan tugas dan wewenang kerapatan adat nagari yaitu:

Tabel 1.1 Tugas dan Wewenang Kerapatan Adat Nagari

Tugas KAN	Wewenang KAN
a. Mengawasi penyelenggaraan Pemerintahan Nagari oleh Kapalo Nagari, b. Menyusun peraturan Nagari bersama Kapalo Nagari, c. Membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Nagari tentang Anggaran Pandapatan dan Belanja Nagari.	a. Memilih dan mengangkat Kapalo Nagari secara musyawarah dan mufakat, b. Menyalurkan aspirasi masyarakat Nagari, c. Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan adat istiadat dan budaya Nagari, d. Meminta pertanggungjawaban pelaksanaan Pemerintahan Nagari kepada Kapalo Nagari, e. Melestarikan nilai-nilai adat dan budaya sesuai Adat Salingka Nagari

Sumber : PERDA Provinsi Sumatera Barat No. 7 Tahun 2018 tentang Nagari

Pada masa sebelum ada nya otonomi daerah Kerapatan Adat Nagari melalui SK Gubernur No. 347/GSB/1984 KAN dalam nagari hanya mengurus urusan adat saja baik itu mengurus tentang tanah ulayat kaum atau sako dan pusako kaum di nagari tersebut. Berdasarkan SK Gubernur di atas peran antara KAN dan Pemerintah Nagari dipisahkan. KAN lebih difokuskan dalam mengurus urusan adat saja, dan pemerintah nagari mengurus urusan nagari. Tetapi dalam hal pemilihan Wali Nagari pada masa itu yang mensahkan calon wali nagari yang terpilih merupakan KAN dan juga mensahkan aturan nagari atau adat di nagari yang dibuat oleh pemerintah nagari. Pada Perda Provinsi Sumatera Barat No 9 Tahun 2000 Tentang Ketentuan Pokok Pemerintahan Nagari, juga mengatur tentang KAN di dalam suatu nagari. Pada tahun 2007 Perda Provinsi

Sumatera Barat No 9 Tahun 2000 tentang Ketentuan Pokok Pemerintahan Nagari digantikan dengan Perda Provinsi Sumatera Barat No 2 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Nagari, dan ketentuan tentang KAN juga tertuang didalam Perda tersebut. Tetapi untuk penentuan dan penetapan tugas dan wewenang serta peran dan fungsi KAN di serahkan kepada pemerintah daerah Kabupaten/Kota masing-masing. Pada Kabupaten Solok tugas, wewenang dan peran KAN di atur dalam Perda Kabupaten Solok No. 4 tahun 2001 tentang Pemerintahan Nagari. Pada Perda Kab.Solok tersebut fungsi atau peran KAN yaitu membina dan mengembangkan serta menyelesaikan sengketa sako dan pusako dalam nagari. Jadi, peran KAN di Kabupaten Solok berdasarkan Perda Kab.Solok No.4 Tahun 2001 tentang Pemerintahan Nagari adalah melestarikan adat istiadat di lingkungan nagari, menyelesaikan permasalahan adat dalam nagari dan mengatur serta mengurus perahal tentang adat istiadat di nagari. Peranan KAN dalam penyelenggaraan pemerintahan Nagari tidak ada disebutkan.

Tetapi pada tahun 2018 pemerintah Provinsi Sumatera Barat mengeluarkan Perda terbaru pengganti dari Perda Sumbar No 2 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Nagari. Perda pengantinya yaitu Perda Provinsi Sumatera Barat No 7 Tahun 2018 tentang Nagari. Didalam Perda ini dituangkan ketentuan-ketentuan tentang KAN, baik itu kedudukan, tugas dan wewenang KAN itu. Peranan KAN dalam Perda Sumbar No 7 Tahun 2018 tentang Nagari ini lebih banyak dalam pengawasan, perencanaan, dan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan nagari. Walaupun peranan utama dari KAN ini tetap melestarikan dan mengembangkan adat istiadat di dalam nagari. Berarti berdasarkan Perda Sumbar No 7 Tahun 2018 tentang Nagari, tugas dan wewenang

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dari KAN itu lebih banyak dalam ikut serta dalam penyelenggaraan pemerintahan nagari.

Salah satu kerapatan adat nagari di Sumatera Barat yaitu kerapatan adat nagari dinagari Panyakalan Kecamatan Kubung, Kabupaten Solok. Berdasarkan hal diatas disini peneliti ingin tahu sejauh mana peran kerapatan adat nagari dinagari Panyakalan pada pemerintahan otonom sekarang ini setelah diberlakukannya Perda Sumbar No 7 Tahun 2018 tentang Nagari.

Jadi dalam hal ini peneliti tertarik meneliti tentang **“PERAN KERAPATAN ADAT NAGARI DALAM PEMERINTAHAN OTONOM DINAGARI PANYAKALAN, KECAMATAN KUBUNG, KABUPATEN SOLOK, PROVINSI SUMATERA BARAT”**

1.2 Rumusan masalah

Berdasarkan dari latar belakang masalah diatas , dapat dirumuskan suatu perumusan masalah yaitu :

1. Bagaimana peran kerapatan adat nagari dalam pemerintahan otonom dinagari Panyakalan?
2. Apa Kendala yang di alami oleh Kerapatan Adat Nagari dalam penyelenggaraan pemerintahan?

1.3 Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui bagaimana peran kerapatan adat nagari dalam pemerintahan otonom dinagari Panyakalan
2. Untuk mengetahui kendala yang di alami oleh kerapata adat nagari dalam penyelenggaraan pemerintahan.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1.4 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut

1. Hasil penelitian ini memberikan sumbangan pikiran bagi penuli dalam hal peran kerapatan adat nagari dalam pemerintahan otonom di nagari Panyakalan
2. Sebagai sumbangsih pemikiran, informasi dan bahan pertimbangan ke depan dalam peranan kerapatan adat nagari dalam pemerintahan otonom dinagari Panyakalan

1.5. Sistematika Penulisan

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini menguraikan latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, serta sistematika penelitian.

BAB II : LANDASAN TEORI

Bab ini menguraikan tentang konsep, konsep operasional/variabel penelitian, hipotesis, dan kerangka pemikiran.

BAB III : METODE PENELITIAN

Bab ini merupakan bab yang menjelaskan tentang waktu dan lokasi penelitian, jenis sumber data, populasi dan sampel teknik pengumpulan data, serta analisis data.

BAB IV : GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN

Dalam bab ini menjelaskan tentang sejarah objek penelitian, aktivitas penelitian, struktur organisasi, dan sebagainya.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB V : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini menjelaskan hasil penelitian dan pembahasan Peran Kerapatan Adat Nagari Dalam Pemerintahan Otonom Di Nagari Panyakalan Kec. Kubung Kab. Solok Prov. Sumatera Barat.

BAB VI : KESIMPULAN DAN SARAN

Pada bab ini berisi tentang kesimpulan dan saran atau rekomendasi Peran Keratapatan Adat Nagari dalam Pemerintahan Otonom di Nagari Panyakalan Kec. Kubung Kab. Solok Prov. Sumbar.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB II

LANDASAN TEORI

Pemerintah Daerah

Secara etimologi, kata pemerintah berasal dari kata “perintah” yang berarti sesuatu yang harus dilaksanakan, kemudian mendapatkan imbuhan sebagai berikut:

1. Awalan “pe-” menjadi kata “pemerintah” berarti badan atau organ elit yang melaksanakan pekerjaan mengurus suatu Negara atau organ yang menjalankan pemerintahan.
2. Akhiran “-an” menjadi kata “pemerintahan” berarti perihal, cara, perbuatan, atau urusan dari badan yang berkuasa dan memiliki legitimasi.

Secara umum pemerintah dapat didefinisikan sebagai organisasi yang memiliki kekuasaan untuk membuat dan menerapkan hukum serta undang-undang di wilayah tertentu. Pemerintah merupakan sebuah organisasi yang memiliki:

1. Otoritas memerintah dari sebuah unit politik
2. Kekuasaan yang memerintah suatu masyarakat politik
3. Aparatur yang merupakan badan pemerintahan yang berfungsi dan menjalankan kekuasaan
4. Kekuasaan untuk membuat peraturan perundang-undangan, untuk menangani perselisihan dan membicarakan putusan administrasi dan dengan monopoli atas kekuasaan yang sah.

Menurut Syafiie (2013:12) pemerintahan adalah sekelompok orang-orang tertentu yang secara baik dan benar serta indah melakukan sesuatu (*eksekusi*) atau

tidak melakukan sesuatu (*not to do*) dalam mengkoordinasikan, memimpin, dalam hubungan antara dirinya dengan masyarakat, antara departemen dan unit dalam tubuh pemerintahan itu sendiri.

Sedangkan menurut Miftah Thoha (2009:71) pemerintahan daerah (*lokal government*) menunjukkan adanya kekuasaan (*authority*) dari unit pemerintahan yang berdiri sendiri (*dependent*) yang didirikan atas persetujuan perlemen untuk memberikan pelayanan dan yang mewakili kepentingan umum (*general interest*) dari suatu wilayah tertentu di bawah kepentingan pemimpin daerah yang dipilih oleh rakyat.

Dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar 1945, pemerintahan daerah yang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan (*mede bewind*), diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat, serta peningkatan daya saing daerah dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, keistimewaan, dan kekhasan satu daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia (Widjaja, 2008:37).

Menurut Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2007 Tentang Pedoman Pelestarian dan Pengembangan Adat Istiadat dan Nilai Sosial Budaya Masyarakat, Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah daerah dan DPRD menurut azas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Republik Indonesia Tahun 1945. Pemerintahan daerah adalah Gubernur, Bupati atau Walikota, dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.

2.2 Otonomi Daerah

2.2.1 Pengertian Otonomi Daerah

Otonomi sesungguhnya diambil dari bahasa Yunani, dari kata “autos” yang bisa diterjemahkan sebagai sendiri, dan “namos” yang berarti undang – undang atau peraturan. Jika disambung dan diartikan berarti maknanya adalah aturan sendiri. Sehingga maksud dari Otonomi Daerah adalah wilayah dengan batas – batas tertentu yang mempunyai aturannya sendiri. Jadi definisi otonomi daerah adalah kewenangan untuk mengatur sendiri pemerintahan dan kepentingan masyarakatnya yang dilakukan oleh suatu daerah.

Menurut Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, otonomi daerah adalah hak, wewenang dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pelaksanaan otonomi daerah merupakan titik fokus yang penting dalam rangka memperbaiki kesejahteraan rakyat. Pengembangan suatu daerah dapat disesuaikan oleh pemerintah daerah dengan potensi dan kekhasan daerah masing-masing. Dengan adanya otonomi daerah menjadi kesempatan yang sangat baik bagi pemerintah daerah untuk membuktikan kemampuannya dalam melaksanakan kewenangan yang menjadi hak daerah. Maju atau tidaknya suatu daerah sangat ditentukan oleh kemampuan dan kemauan untuk melaksanakan yaitu pemerintah

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

daerah. Pemerintah daerah bebas berkreasi dan berekspresi dalam rangka membangun daerahnya, tentu saja dengan tidak melanggar ketentuan perundang-undangan.

Prinsip dalam pelaksanaan otonomi daerah:

1. Prinsip Otonomi Seluas-Luasnya

Ini merupakan prinsip otonomi dimana daerah yang mendapat kewenangan dalam mengatur dalam hal pemerintahan dan mengatur kepentingan masyarakatnya. Namun, otonomi tersebut tidak memiliki kewenangan dalam hal politik luar negeri, agama, moneter, keamanan, peradilan, serta fiskal nasional.

2. Prinsip Otonomi Nyata

Ini adalah prinsip otonomi dimana daerah otonom memiliki kewenangan dalam menjalankan pemerintahan berdasarkan tugas, wewenang, dan kewajiban yang secara nyata telah ada. Tugas, wewenang, dan kewajiban tersebut berpotensi untuk berkembang sesuai dengan ciri khas daerah dan segala potensinya.

3. Prinsip Otonomi Bertanggungjawab

Ini adalah prinsip otonom dimana sistem penyelenggaraan harus sesuai dengan maksud dan tujuan dari pemberian otonomi. Pada dasarnya otonomi bertujuan agar daerah tersebut dapat berkembang dan masyarakatnya lebih sejahtera.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2.2.2 Asas-Asas Otonomi Daerah

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, terdapat 3 jenis penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi dasar bagi Pemerintah Daerah dalam pelaksanaan Otonomi Daerah, yaitu asas Desentralisasi, Dekonsentrasi, dan Tugas Pembantuan.

1. Desentralisasi

Desentralisasi adalah pemberian wewenang oleh pemerintah pusat kepada pemerintah daerah untuk mengurus urusan daerahnya sendiri berdasarkan asas otonom. Menurut Mahfud MD 2000 (dalam buku Almasri dan Muammar Alkadafi 2018 : 59), Desentralisasi adalah penyerahan wewenang dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah untuk mengatur dan mengurus daerah, mulai dari kebijakan, perencanaan, sampai pada implementasi dan pembiayaan dalam rangka demokrasi.

Menurut Supriyanto 2009 (dalam buku Almasri dan Muammar Alkadafi 2018 : 60), maksud desentralisasi adalah memacu pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya dalam meningkatkan kesejahteraan rakyat, menggerakkan prakarsa dan peran serta masyarakat, serta meningkatkan pendayagunaan potensi daerah secara optimal dan terpadu mengisi otonomi daerah yang nyata, dinamis, bertanggung jawab, serta memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa.

2. Dekonsentrasi

Dekonsentrasi adalah pelimpahan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat kepada gubernur sebagai

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

wakil Pemerintah Pusat, kepada instansi vertikal di wilayah tertentu, dan/atau kepada gubernur dan bupati/wali kota sebagai penanggung jawab urusan pemerintahan umum. Maksud dari asas ini ialah pemberian wewenang dari pemerintahan pusat kepada alat – alat mereka yang berada di daerah untuk melakukan penyelenggaraan urusan tertentu yang telah ditetapkan. Dengan kata lain, wewenang didelegasikan. Tanpa kehilangan wewenangnya, pemerintah daerah akan melaksanakan tugas atas nama pemerintah pusat. Penyebaran wewenang diberikan pada petugas – petugas yang telah ditunjuk di setiap wilayah untuk selanjutnya diberikan tugas administratif atau tata usaha untuk keberlangsungan penyelenggaraan negara.

3. Tugas pembantuan

Tugas Pembantuan adalah penugasan dari Pemerintah Pusat kepada daerah otonom untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat atau dari Pemerintah Daerah provinsi kepada Daerah kabupaten/kota untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah provinsi. Asas ini berdasarkan pada penugasan suatu urusan dari pusat ke daerah yang lebih rendah tingkatannya. Misalnya dari pemerintah pusat ke kabupaten atau kota untuk melakukan kewenangan pusat yang juga sudah menjadi kewenangan daerah. Tentang Tugas Pembantuan ini semua sudah diatur dalam undang – Undang Nomor 5 Tahun 1974, (desa membantu dalam urusan pemerintahan yang ditugaskan daerah). Ada dua hal yang

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

terkandung dalam tugas pembantuan ini, yaitu adanya penyiratan antara hubungan atasan dan bawahan. Dimana atasan adalah pemerintah pusat, dan pemerintahan daerah berlaku sebagai bawahan yang membantu pusat untuk melaksanakan tugasnya dalam menyelenggarakan negara.

Dengan adanya asas ini maka:

- a. Hubungan antara daerah dan pusat bisa mewujudkan kesejahteraan sosial di daerah yang bersangkutan
- b. Hubungan antara daerah dan pusat antar satu dengan yang lainnya bisa berbeda – beda
- c. Hubungan antara daerah dan pusat yang terjalin tidak boleh membuat hak – hak rakyat menjadi berkurang, malahan rakyat turut serta dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah
- d. Hak – hal daerah tidak boleh untuk berprakarsa dalam hubungan antara pemerintahan pusat dan pemerintahan daerah.

2.2.3 Tujuan Otonomi Daerah

Adapun tujuan pemberian otonomi daerah adalah sebagai berikut :

1. Peningkatan pelayanan masyarakat yang semakin baik.
2. Pengembangan kehidupan demokrasi.
3. Keadilan nasional.
4. Pemerataan wilayah daerah.
5. Pemeliharaan hubungan yang serasi antara pusat dan daerah serta antar daerah dalam rangka keutuhan NKRI.
6. Mendorong pemberdayaan masyarakat.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

7. Menumbuhkan prakarsa dan kreativitas, meningkatkan peran serta masyarakat, mengembangkan peran dan fungsi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Secara konseptual, Indonesia dilandasi oleh tiga tujuan utama yang meliputi: tujuan politik, tujuan administratif dan tujuan ekonomi. Hal yang ingin diwujudkan melalui tujuan politik dalam pelaksanaan otonomi daerah adalah upaya untuk mewujudkan demokratisasi politik melalui partai politik dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Perwujudan tujuan administratif yang ingin dicapai melalui pelaksanaan otonomi daerah adalah adanya pembagian urusan pemerintahan antara pusat dan daerah, termasuk sumber keuangan, serta pembaharuan manajemen birokrasi pemerintahan di daerah. Sedangkan tujuan ekonomi yang ingin dicapai dalam pelaksanaan otonomi daerah di Indonesia adalah terwujudnya peningkatan indeks pembangunan manusia sebagai indikator peningkatan kesejahteraan masyarakat Indonesia.

2.3 Peran

Menurut Soekanto (2009), peran adalah suatu pekerjaan yang dilakukan dengan dinamis sesuai dengan status atau kedudukan yang disandang. Status dan kedudukan ini sesuai dengan keteraturan sosial, bahkan dalam keteraturan tindakan semuanya disesuaikan dengan peran yang berbeda. Peran dipengaruhi oleh keadaan sosial baik dari dalam maupun dari luar dan bersifat stabil. Seseorang melaksanakan hak dan kewajiban, berarti telah menjalankan suatu peran. Peran dan status tidak dapat dipisahkan. Tidak ada peran tanpa kedudukan atau status, begitu pula tidak ada status tanpa peran. Setiap orang mempunyai bermacam-

© Hal Cipta milia UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Saif Kasim Riau

macam peran yang dijalankan dalam pergaulan hidupnya di masyarakat. Peran menentukan apa yang diperbuat seseorang bagi masyarakat. Peran juga menentukan kesempatan-kesempatan yang diberikan oleh masyarakat kepadanya. Peran diatur oleh norma-norma yang berlaku. Peran lebih menunjukkan pada fungsi penyesuaian diri, dan sebagai sebuah proses. Peran yang dimiliki oleh seseorang mencakup tiga hal antara lain..

1. Peran meliputi norma-norma yang dihubungkan dengan posisi seseorang di dalam masyarakat. Jadi, peran di sini bisa berarti peraturan yang membimbing seseorang dalam masyarakat.
2. Peran adalah sesuatu yang dilakukan seseorang dalam masyarakat.
3. Peran juga merupakan perilaku seseorang yang penting bagi struktur sosial masyarakat.

2.4 Desa

2.4.1 Pengertian Desa

Desa menurut Undang-Undang No 6 Tahun 2014 Tentang Desa, “ *Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam system pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.*”

Menurut definisi desa diatas, desa itu memiliki batas wilayah yang jelas dan desa itu memiliki wewenang untuk mengatur urusan pemerintahan dan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kepentingan masyarakatnya berdasarkan aturan yang berlaku di desa tersebut. Di setiap desa memiliki aturan atau hukum setempat yang berlaku atau sering juga disebut hukum adat setempat. Hukum adat itu lah yang mengatur semua kepentingan masyarakat dalam desa. Dan Negara Republik Indonesia mengakui atau menghormati hukum adat tersebut seperti dijelaskan dalam definisi desa di atas.

Menurut orang awam/umum, desa merupakan suatu tempat atau wilayah yang didiami oleh sekelompok penduduk yang umumnya bercirikan antara lain : mata pencaharian bertumpu pada sector pertanian, tingkat pendidikan masyarakat yang relative rendah, keberadaan fasilitas pelayanan umum yang relatif terbatas dan sering dipahami sebagai suatu kondisi yang bertolak belakang dengan wilayah kota atau suasana perkotaan, terutama dari aspek keberadaannya. Para ahli/pakar mendefinisika desa sebagai berikut : Menurut Hanif Nurcholis 2001 (dalam buku Almasri dan Muamar Alkadafi 2018 : 204)

“Desa adalah suatu wilayah yang didiami oleh sejumlah penduduk yang saling mengenal atas dasar hubungan kekerabatan dan/atau kepentingan politik, sosial, ekonomi, dan keamanan yang dalam petumbuhannya menjadi kesatuan masyarakat hukum berdasarkan adat sehingga terdapat ikatan lahir dan batin antara masing-masing warganya, umumnya warganya hidup dari pertanian, mempunyai hak mengatur rumah tangga sendiri, dan secara administrative berada dibawah pemerintah kabupaten/kota.”

Pada zaman sebelum kemerdekaan maupun setelah kemerdekaan penyebutan istilah desa sebenarnya lebih akrab atau lebih populer, terutama dalam lingkungan masyarakat di Jawa-Bali-Madura. Sedangkan pada masyarakat Sumatera, Kalimantan, Sulawesi dan daerah lainnya terdapat berbagai istilah untuk menyebutkan istilah yang sejenis dengan desa, seperti :

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Nagari

Nagari merupakan penyebutan desa dalam wilayah pemerintahan Provinsi Sumatera Barat. Berdasarkan pasal 1 ayat (2) Peraturan daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 tahun 2018 tentang Nagari, menjelaskan bahwa nagari itu merupakan

“kesatuan masyarakat hukum adat secara geneologis dan historis memiliki batas-batas dalam wilayah tertentu, memiliki harta kekayaan sendiri, berwenang memilih pemimpinnya secara musyawarahserta mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan filosofi dan sandi adat “ Adat basandi syara’, syara’ basandi kitabullah” dan/atau berdasarkan asal usul dan adat isitiadat setempat dalam wilayah Provinsi Sumatera Barat.”

2. Marga

Marga merupakan penyebutan desa bagi masyarakat Sumatera Selatan dimasa lampau. Marga adalah suatu system pemerintahan tradisional yang secara sosial-budaya mengakar pada system organisasi sosial yang disebut jurai atau sumbay. Jurai atau sumbay sendiri merupakan system organisasi sosial yang berbasiskan ikatan-ikatan geneologis. Marga dipimpin oleh seorang tokoh yang pada umumnya dikenal dengan sebutan Pasirah.

3. Gampong

Gampong adalah unit pemerintahan terendah dalam struktur pemerintahan Nanggroe Aceh Darussalam, dan disebut juga sebagai suatu persekutuan masyarakat hukum adat terkecil di Aceh. Gampong sudah dikenal sejak masa Kejaraan Aceh Darussalam yang didirikan oleh Sultan Ali Mughayat Syah pada tahun 1514. Masa itu, gampong adalah kesatuan wilayah hukum terendah yang asli lahir dari masyarakat. Gampong

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

biasanya didiami oleh penduduk yang berada dalam satu ikatan geneologis berdasarkan garis keturunan ibu. Pada masa kerajaan Aceh, gampong sebagai wilayah terendah dalam struktur pemerintahan dijalankan oleh tiga pilar, yaitu : keuchik, imam/teungku meunasah dan ureueng tuha.

4. Huta, Sosor dan Lumban

Huta, sosor dan lumban merupakan penyebutan desa yang berada di daerah Mandailing, Sumatera Utara. Huta yaitu kampung (perkampungan). Merupakan kesatuan teritorial terendah yang bersifat otonom dalam kerajaan Batak pada Zaman Si Singamangaraja, dengan susunan pemerintahan menurut hukum adat batak. Penduduk huta terdiri dari keluarga-keluarga pendiri huta yang berasal dari satu marga yang disebut merga raja. Lumban yaitu kuta (kampung). Bahasa batak Toba asli untuk mengatakan kampung adalah lumban atau banjar. Sosor yaitu suatu perkampungan baru yang biasanya kecil dan yang didirikan karena huta induk telah terlampau penuh.

5. Kuta

Kuta (bahasa Karo) merupakan penyebutan desa di wilayah Karo, Sumatera Utara. Kuta (kampung), pengertiannya sama seperti huta, hanya lebih besar dihuni oleh beberapa klen/marga yang berbeda-beda.

6. Negeri

Negeri merupakan pengganti istilah desa yang digunakan di daerah Maluku. Menurut Perda Kabupaten Maluku Tengah No 1 Tahun 2016 Tentang Negeri, menjelaskan “ Negeri adalah kesatuan masyarakat hukum

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

adat yang bersifat geneologis territorial yang memiliki batas wilayah, berwenang mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan hak asal-usul dan adat istiadat setempat berada di Kabupaten Maluku Tengah yang diakui dan dihormati dalam system pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.”

7. Kampung

Kampung merupakan penyebutan desa untuk wilayah Riau, Sulawesi dan Kalimantan. Kampung adalah suatu daerah, di mana terdapat beberapa rumah atau keluarga yang bertempat tinggal di sana.

2.4.2 Struktur Pemerintah Desa

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Pasal 25 bahwa “ Pemerintah desa adalah Kepala desa atau yang disebut dengan nama lain dan yang dibantu oleh perangkat desa atau yang disebut dengan nama lain.” Jadi, dalam struktur pemerintah desa itu ada Kepala Desa dan Perangkat Desa yang membantu kepala desa dalam menjalankan pemerintahan desa. Selanjutnya pada Pasal 26 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa disebutkan : “ Kepala Desa bertugas menyelenggarakan Pemerintahan Desa, melaksanakan Pembangunan Desa, Pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa.” Jadi perangkat desa adalah Pembantu kepala desa dan pelaksanaan tugas menyelenggarakan pemerintahan desa, melaksanakan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa. Perangkat desa menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa dalam Pasal 48.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

“Perangkat desa terdiri atas :

- a. Sekretaris desa,
- b. Pelaksana kewilayahan, dan
- c. Pelaksana teknis. “

Perangkat desa diangkat oleh Kepala Desa setelah dikonsultasikan dengan Camat atas nama Bupati/Walikota. Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, perangkat desa bertanggung jawab kepada kepala desa. Perangkat desa diangkat dari warga desa yang memenuhi persyaratan, karena tugas pemerintah desa begitu berat maka perangkat desa harus memiliki kemampuan yang memadai untuk bisa mendukung Kepala Desa dalam menjalankan pemerintahan dan pembangunan.

2.5 Nagari

2.5.1 Pengertian Nagari

Istilah nagari merupakan penyebutan lain desa diminangkabau. Hal ini sebagai mana yang dimaksud dalam pasal 6 ayat (2) Undang-Undang No 6 tahun 2014 tentang Desa yang menyatakan bahwa penyebutan desa/desa adat yang sebagaimana dimaksud ayat (1) penyebutannya berlaku di daerah setempat.

Berdasarkan pasal 1 ayat (2) Peraturan daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 tahun 2018 tentang Nagari, menjelaskan bahwa nagari itu merupakan

“kesatuan masyarakat hukum adat secara geneologis dan historis memiliki batas-batas dalam wilayah tertentu, memiliki harta kekayaan sendiri, berwenang memilih pemimpinnya secara musyawarahserta mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan filosofi dan sandi adat “ Adat basandi syara’, syara’ basandi kitabullah” dan/atau berdasarkan asal usul dan adat isitiadat setempat dalam wilayah Provinsi Sumatera Barat.”

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pada setiap nagari di bentuk pemerintahan nagari sebagai penyelenggara nagari. Pemerintah nagari di pimpin oleh Kapalo Nagari atau disebut juga Wali Nagari. Tugas utama dari Wali Nagari adalah menyelenggarakan pemerintahan nagari, melaksanakan pembangunan, pelayanan public, dan pemberdayaan masyarakat. Pemilihan wali nagari nagari ditentukan dalam musyawarah mufakat Kerapatan Adat Nagari. Tata cara pemilihan nya diatur oleh pemerintah Kabupaten atau Kota dengan Perda. Dalam menyelenggarakan pemerintahan nagari wali nagari dibantu oleh perangkat nagari dan perangkat nagari ini di angkat atau di pilih oleh wali nagari sendiri.

2.5.2 Struktur Pemerintahan

Dalam strukutr pemerintahan nagari terdapat tiga lembaga nagari yang menjalankan pemerintahan nagari. Pertama, Badan Musyawarah Nagari (BMN) merupakan badan legislative dalam nagari yang memiliki tugas mengawasi penyelenggaraan pemerintahan nagari dan menyusun peraturan nagari dan anggaran nagari. Kedua, pemerintah nagari. Pemerintah nagari dipimpin oleh wali nagari yang memiliki tugas untuk sebagai penyelenggara pemerintahan nagari dan melaksanakan pembangunan, pelayanan public dan pemberadayaan masyarakat. Ketiga kerapatan adat nagari adalah lembaga nagari yang berperan dalam melaksanakan pemberdayaan masayakat dalam hal adat istiadat dan penyelesaian permasalahan adat istiadat dalam nagari.

Dari ketiga lembaga struktur pemerintahan nagari diatas yang menjadi pimpinan atau lembaga tertinggi berada ditanag BMN, karena dalam hal memutuskan sesuatu perihal wali nagari harus memusyawarah kan dengan BMN

terlebih dahulu. Struktur kedua berada pada pemerintah nagari atau wali nagari sebagai penyelenggara nagari dan selanjutnya berada di tangan kerapatan adat nagari sebagai lembaga adat nagari. Jadi, susunan struktur pemerintahan nagari yaitu : Badan Musywarah Nagari (BMN), Pemerintah Nagari (Wali Nagari), dan Kerapatan Adat Nagari (KAN).

2.5.3 Kedudukan Nagari Dalam Sistem Pemerintahan Indonesia

Nagari adalah pembagian wilayah administrative sesudah kecamatan di Propinsi Sumatera Barat. Jadi dalam pembagian wilayah administrative Negara Republik Indonesia, nagari berada pada wilayah administrative tingkat IV yang mana setara dengan desa. Nagari merupakan penyebutan lain desa di wilayah Provinsi Sumatera Barat, jadi berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Pasal 5 menjelaskan “ Desa berkedudukan di wilayah Kabupaten/Kota”. Berdasarkan penjelasan tersebut berarti nagari juga berkedudukan di wilayah Kabupaten/Kota.

2.6 Kerapatan Adat Nagari

2.6.1 Pengertian

Menurut Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2018

tentang Nagari menjelaskan

“Kerapatan Adat Nagari yang selanjutnya disingkat KAN atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang merupakan perwujudan permusyawaratan perwakilan tertinggi dalam penyelenggaraan Pemerintahan Nagari yang keanggotaannya terdiri dari perwakilan ninik mamak dan unsur alim ulama Nagari, unsur cadiak pandai, unsur Bundo Kanduang, dan unsur parik paga dalam Nagari yang bersangkutan sesuai dengan adat salingka Nagari.”

Kerapatan Adat Nagari berada di bawah pengawasan Lembaga Kerapatan Adat Alam Minangkabau (LKAAM) mulai dari tingkat kecamatan hingga provinsi. Kerapatan Adat Nagari merupakan suatu lembaga di dalam nagari yang mengurus dan menjaga serta melestarikan adat dan kebudayaan di Minangkabau. Kerapatan adat nagari memiliki kedudukan penting dalam pemerintahan nagari, sebab dalam memutuskan peraturan nagari dan rancangan anggaran nagari kerapatan adat nagari ikut dalam penyusunan. Di dalam suatu kenagarian keputusan-keputusan KAN di jadikan pedoman oleh Wali Nagari dalam menjalankan pemerintahannya dan wajib di taati oleh seluruh msyarakat kenagrian tersebut sepanjang tidak melanggar peraturan dan perundangan yang berlaku. Selain mengurus adat dan melestarikan nya KAN juga merupakan lembaga peradilan adat dalam suatu kenagarian. KAN sebagai lembaga peradilan adat dalam nagari berfungsi menyelesaikan masalah sengketa sako, pusako, pelanggaran adat dan pelanggaran syarak. Kerapatan adat nagari lebih banyak menyelesaikan permasalahan dalam adat atau sengketa dalam suku.

Menurut PERDA Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 tahun 2018 tentang Nagari menjelaskan masa Jabatan Kerapatan Adat Nagari ditentukan berdasarkan Adat Salingka Nagari. Maksudnya masa jabatan kerapatan adat nagari yang menentukan adalah musyawarah atau mufakat dari seluruh suku dan pemangku adat diseluruh nagari. Jadi, masa jabatan kerapatan adat nagari tiap nagari berbeda, tergantung dari hasil musyawarah dari seluruh pemangku adat didalam nagari masing-masing. Tetapi jika Adat Salingka Nagari tidak menentukan masa jabatan Kerapatan Adat Nagari, maka masa jabatan Kerapatan Adat Nagari

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ditetapkan selama 6 (enam) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 2 (dua) kali masa jabatan.

2.6.2 Tugas Kerapatan Adat Nagari

Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 7 tahun 2018 tentang Nagari, tugas dari kerapatan adat nagari meliputi :

1. Mengawasi penyelenggaraan Pemerintahan Nagari oleh Kapalo Nagari;

Pengawasan dianggap sangat penting dalam melaksanakan suatu kegiatan dalam rangka membandingkan hasil yang akan dicapai dengan perencanaan awal kegiatan. Dalam hal pengawasan, tidak hanya melihat apa yang terjadi melainkan memperbaiki hasil yang telah dikerjakan, sesuai dengan pendapat Siagian (2006 : 23), pengawasan adalah sebagai proses pengamatan dari pada pelaksanaan seluruh kegiatan untuk menjamin agar supaya semua pekerjaan yang sedang dilakukan berjalan sesuai dengan rencana yang telah dilakukan.

Pengawasan memiliki fungsi yang sangat banyak dalam hal pembangunan seperti menurut Winardi (2007 : 226), pengawasan adalah keseluruhan daripada kegiatan yang membandingkan atau mengukur apa yang sedang atau telah dilaksanakan dengan kriteria, norma-norma standar atau rencana-rencana yang telah ditetapkan sebelumnya.

Dalam hal ini kerapatan adat nagari mengawasi penyelenggaraan pemerintahan nagari yang dipimpin oleh kapalo nagari atau wali nagari. Pengawasan yang dilakukan oleh kerapatan adat nagari dapat berbentuk pengawasan dalam pembangunan nagari, sosial kemasyarakatan nagari,

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pelayanan publik pemerintah nagari dan pengawasan lainnya dalam pemerintahan nagari. Apabila dalam penyelenggaraan pemerintahan terdapat kesalahan atau ketidaksesuaian dengan aturan yang dilakukan oleh pemerintah nagari kerapatan adat nagari dapat menegur atau memberikan peringatan kepada pemerintah nagari bahwasanya apa yang dilakukan telah tidak sesuai dengan aturan.

2. Menyusun peraturan Nagari bersama Kapalo Nagari;

Peraturan nagari adalah peraturan perundang-undangan yang dibuat berdasarkan kesepakatan bersama Badan Musyawarah Nagari dan lembaga-lembaga dilingkungan pemerintahan nagari. Peraturan nagari berfungsi untuk mengatur kehidupan masyarakat nagari agar masyarakat nagari bisa hidup tentram, aman dan sejahtera. Peraturan nagari bisa dari berbagai bidang seperti pembangunan, keamanan, sosial kemasyarakatan dan lainnya.

Dalam penyusunan peraturan nagari KAN tentunya pasti dilibatkan terutama dalam peraturan nagari tentang sosial kemasyarakatan dan pembangunan. Sebab KAN dalam sosial kemasyarakatan KAN lebih banyak mengetahui tentang kehidupan masyarakat nagari, dan dalam pembangunan KAN yang lebih tau mengenai tanah ulayat masyarakat nagari. Karna KAN merupakan lembaga adat nagari.

3. membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Nagari tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari.

Anggaran pendapatan dan belanja nagari adalah rancangan keuangan tahunan pemerintahan nagari yang dibahas dan disetujui

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

bersama oleh pemerintah nagari dan lembaga-lembaga dilingkungan pemerintahan nagari yang ditetapkan dengan peraturan nagari. Anggaran pendapatan dan belanja nagari disusun agar pelaksanaan pemerintahan nagari bisa berjalan dengan baik, baik itu dalam bidang pembangunan, pelayanan publik, sosial kemasyarakatan dan lainnya.

Dalam penyusunan anggaran pendapatan dan belanja nagari KAN dilibatkan, sebab KAN lebih mengetahui pembangunan dalam nagari serta perizinan pembangunan di tanah ulayat KAN yang mengetahui. Tidak hanya itu, dalam menjalankan tugas dan wewenangnya KAN membutuhkan anggaran agar bisa berjalan dengan baik, oleh sebab itu KAN dilibatkan dalam penyusunan rancangan anggaran pendapatan dan belanja nagari.

2.6.3 Wewenang Kerapatan Adat Nagari

Dalam Pasal 8 Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 tahun 2018 tentang nagari, wewenang kerapatan adat nagari adalah :

1. Memilih dan mengangkat Kapalo Nagari secara musyawarah dan mufakat;

Didalam suatu daerah nagari pasti memiliki seorang pemimpin dan pemimpin dalam nagari adalah kapalo nagari atau wali nagari. Dan untuk mendapat seorang pemimpin harus lah dipilih baik dipilih langsung oleh masyarakat maupun dipilih oleh KAN. Dalam memilih suatu pemimpin harus lah dilakukan dengan agar mendapatkan pemimpin yang bisa memimpin nagari dengan baik.

Dalam Perda Sumbar No 7 tahun 2018 yang memiliki wewenang memilih dan mengangkat pemimpin nagari adalah lembaga Kerapatan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Adat Nagari. Memilih wali nagari dilakukan oleh KAN dengan cara musyawarah dengan lembaga-lembaga dilingkungan kenagarian.

2. Menyalurkan aspirasi masyarakat Nagari;

Aspirasi adalah harapan atau tujuan untuk keberhasilan dimasa yang akan datang. Aspirasi masyarakat nagari adalah harapan dari masyarakat untuk keberhasilan mencapai tujuan nagari dimasa yang akan datang. Fungsi dari ada nya aspirasi adalah agar ada perubahan yang lebih baik dimasa yang akan datang dan sesuai dengan keinginan masyarakat.

Dalam menampung dan menyampaikan aspirasi masyarakat adalah wewenang dari KAN. KAN menampung aspirasi masyarakat dann menyampaikan aspirasi masyarakat tersebut ke pemerintah nagari. Untuk menampung aspirasi masyarakat KAN harus turun langsung kemasyarakat untuk mendegarkan harapan dari masyarakat. Serta harus cepat untuk menanggapi harapan masyarakat tersebut dengan menyampaikan ke pemerintah nagari.

3. Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan adat istiadat dan budaya Nagari;

Adat istiadat nagari adalah adat dan kebiasaan yang berlakukan daalam kehidupan masyarakat nagari. Dalam menjalankan kehidupan ber nagari masyarakat harus menjalankan adat istiadat nagari. Jika melanggar aturan adat istiadat akan diberi sanksi sesuai hukum adat. Contoh adat istiadat dalam nagari adalah adat dalam pernikahan, kematian dan lainnya. Untuk pengawasan terhadap pelaksanaan adat istiadat merupakan tugas pokok dari KAN. Sebab KAN merupakan lembaga adat dalam nagari.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

4. meminta pertanggungjawaban pelaksanaan Pemerintahan Nagari kepada Kapalo Nagari; dan

Pertanggungjawaban merupakan suatu bentuk tanggungjawab dalam melaksanakan kewajiban bagi seseorang atau organisasi. Pertanggungjawaban pelaksanaan pemerintahan nagari adalah suatu bentuk tanggungjawab dari pemerintah nagari yang diwakili wali nagari atas pelaksanaan tugas dan wewenang nya dalam pemerintahan nagari. Pertanggungjawaban bisa dalam bentuk Laporan PertanggungJawaban atau sering disebut LPJ.

Untuk meminta pertanggung jawaban dari pemerintah nagari dapat dilakukan oleh KAN. Meminta pertanggung jawaban ini juga salah satu bentuk pengawasan yang dilakukan oleh KAN terhadap pemerintah nagari. Maminta pertanggung jawaban pemerintahan nagari guna nya agar bisa melihat sejauh mana pemerintah nagari menjalankan tugas nya sebagai pejabat pemerintahan. Dan juga mengetahui apakah kinerja pemerintah nagari bagus dalam membangun nagari baik dari fisik maupun sosial kemasyarakatannya.

5. Melestarikan nilai-nilai adat dan budaya sesuai Adat Salingka Nagari.

Adat Salingka Nagari adalah adat yang berlaku dalam suatu nagari sesuai dengan prinsip adat yang berlaku secara umum atau adat sebatang panjang dan diwarisi secara turun temurun di Minangkabau. Melestarikan nilai-nilai adat merupakan suatu kegiatan pengembangan adat istiadat atau mengenal kan adat istiadat kepada generasi penerus agar tidak hilang nya

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

nilai-nilai adat ditengah-tengah masyarakat. Untuk melestarikan nilai-nilai adat bisa dilakukan dengan membuat pelatihan atau pembinaan tentang kesenian adat salingka nagari dan pembinaan adat lainnya.

Untuk melestarikan nilai-nilai adat dilakukan oleh KAN dan itu wewenang dari KAN. Itu tidak hanya wewenang KAN tapi tugas pokok dari KAN, sebab KAN merupakan lembaga adat dalam nagari. Agar pelestarian nilai-nilai adat bisa berjalan dengan baik, KAN harus menyiapkan program-program tentang adat seperti pelatihan kesenian minang dan lain sebagainya.

2.7 Perspektif Islam

Pada dasarnya tidak ada aturan dalam hukum Islam mengenai Pelaksanaan Otonomi Daerah dan tidak terdapat dalil khusus yang menegaskan. Dapat dikatakan bahwa di dalam pelaksanaan otonomi daerah dalam Hukum Islam tidak ada. Karena sistem otonomi daerah muncul di Era Reformasi berlakunya otonomi daerah, agar terwujudnya keadilan, dan kesejahteraan masyarakat. Dalam pelaksanaan otonomi daerah adanya pemimpin dalam kekuasaan pemerintahan, dan seorang pemimpin telah memegang amanat, yang mendapat amanat dalam kepemimpinan (kekuasaan) politik maka menjadi keharusan konstitusional dan sekaligus kewajiban agama untuk menunaikan amanah yang menjadi tanggungjawabnya. Sebagaimana Allah SWT berfirman dalam Surat An-Nisa Ayat 59:

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولَى الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَزَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۚ ذَٰلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا ﴿٥٩﴾

Artinya : “Hai orang-orang yang beriman, ta’atilah Allah dan ta’atilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Qur’an) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya”. (QS, An-Nisa: 59)

Ayat yang secara langsung memerintahkan manusia, lebih khusus lagi memegang kekuasaan politik, untuk menunaikan Amanah Allah SWT berfirman dalam Surat An-Nisa ayat 58:

﴿ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا ﴾

Artinya : “Sesungguhnya Allah menyuruh kamu untuk menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (meyuruh kamu) apabila menetapkan hukum diantara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah member pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah maha mendengar lagi Maha melihat”. (QS. An-Nisa:58).

Dalam pelaksanaan otonomi daerah pemerintahan daerah harus bertanggungjawab dengan komponen masyarakatnya. Oleh karena itu, masyarakat harus membantu dalam pelaksanaan otonomi di daerahnya dengan penuh tanggungjawab agar bisa terwujudnya otonomi yang baik. Pada masa Khalifah Umar, wilayah kekuasaan Negara Madinah makin menjadi luas meliputi Semenanjung Arabia, Palestina, Suria, Irak, Persia dan Mesir. Umar yang dikenal sebagai Negarawan, administrator, terampil dan pandai, dan seorang pembaru

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

membuat berbagai kebijakan mengenai pengelola wilayah kekuasaan yang luas. Ia menata struktur kekuasaan dan administrasi kekuasaan pemerintahan Negara Madinah. Kekuasaan tertinggi yang bertugas membuat keputusan atas masalah-masalah umum dan kenegaraan yang dihadapi khalifah adalah Majelis Permusyawaratan yang dibentuk oleh Khalifah Umar. Adapun anggota Majelis ini terdiri dari kaum Muhajirin dan kaum Anhsar (suku Khazraj dan Aus). Nama-nama yang tercatat menjadi anggota Majelis ini antara lain Usman, Ali, Abdurrahman Bin Auf, Muaz Bin Jabal, Ubay Bin Kaab, Zaid Tsabit dan lain-lain. Dari sudut ketatanegaraan, Majelis ini dapat disebut sebagai pemegang kekuasaan legislative, sekalipun penentu keputusan akhir adalah khalifah.

2.8 Definisi Konsep

Berdasarkan uraian konsep diatas dapat dirumuskan definisi konsep karya ilmiah adalah sebagai berikut :

1. Peran adalah suatu pekerjaan yang dilakukan dengan dinamis sesuai dengan status atau kedudukan yang disandang.
2. Otonomi Daerah adalah hak, wewenang dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.
3. Kerapatan Adat Nagari adalah lembaga yang merupakan perwujudan permusyawaratan perwakilan tertinggi dalam penyelenggaraan Pemerintahan Nagari yang keanggotaannya terdiri dari perwakilan ninik mamak dan unsur alim ulama Nagari, unsur cadiak pandai, unsur Bundo

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Kanduang, dan unsur parik paga dalam Nagari yang bersangkutan sesuai dengan adat salingka Nagari

Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu yang peneliti jadi sebagai acuan dan perbandingan terhadap penelitian ini yaitu :

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu

No	Nama/Tahun	Judul	Hasil Penelitian	Perbedaan
	Lia Safitri, Ichsan Malik, Josephine R. Marietta/ 2018	Nagari Sebagai Pranata Penyelesaian Konflik : Suatu Kajian Tentang Kerapatan Adat Nagari (Kan) Di Nagari Ketaping, Pariaman, Sumatra Barat	Rendahnya eskalasi konflik di Nagari Ketaping ini karena adanya upaya pencegahan konflik tanah ulayat oleh Kerapatan Adat Nagari dengan menggunakan kerangka penyelesaian konflik tanah ulayat sehingga pencegahan konflik dapat dilakukan. Selain itu dengan adanya pengoptimalan berlakunya hukum adat yang merupakan kearifan lokal yang dimiliki oleh Nagari Ketaping dan sinergitas yang baik dari pemerintah	Penelitian yang dilakukan Lia Safitri dan kawan-kawan merupakan penelitian tentang upaya pencegahan konflik yang dilakukan oleh KAN, sedangkan penelitian yang peneliti lakukan tentang peran KAN dalam penyelenggaraan Pemerintah nagari

No	Nama/Tahun	Judul	Hasil Penelitian	Perbedaan
			dengan KAN menyebabkan tingkat konflik di Nagari ini rendah.	
	Desna Aromatica, Heru Nurasa, Ida Widianingsih & Entang Adhy Muhtar / 2018	Analisis Kelembagaan Pemerintahan Nagari di Kabupaten Solok Provinsi Sumatera Barat	Kelembagaan pemerintahan Nagari tidak dibangun dari nilai-nilai dan norma yang hidup dan berlaku dalam masyarakat adat.	Penelitian yang dilakukan oleh Desna dan kawan-kawan adalah penelitian tentang kelembagaan yang ada dalam pemerintahan nagari, sedangkan peneliti yang peneliti lakukan ini tentang peran KAN dalam penyelenggaraan pemerintahan nagari.
3	Velly Farhana Azra, Sri Wahyu Ananingsih, dan Triyono / 2017	Kewenangan Kerapata Adat Nagari (KAN) Dalam Penyelesaian Sengketa Tanah Ulayat Di Nagari Koto Baru Kabupaten Solok Berdasarkan Perda Sumatera Barat No. 6 Tahun 2008	Kewenangan KAN Koto Baru adalah mengurus urusan hokum adat dan juga menyelesaikan perkara adat salah satunya sengketa tanah ulayat/pusako. Penyelesaian sengketa tanah ulayat di Koto Baru oleh KAN dengan berlandaskan Perda Sumatera Barat No.6 Tahun 2008.	Penelitian yang dilakukan Velly dan kawan-kawan merupakan tentang kewenangan KAN dalam penyelesaian sengketa tanah ulayat, sedangkan penelitian yang peneliti lakukan tentang peran KAN dalam penyelenggaraan pemerintahan nagari.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2.10 Kerangka Pemikiran

Gambar. 2.1
Kerangka Pemikiran



2.11 Indikator

Indicator yang peneliti guna bersumber dari Perda Provinsi Sumatera Barat No 7 Tahun 2018 tentang Nagari yaitu :

Tabel 2.2 Indikator

Referensi	Indikator	Sub Indikator
PERATURAN DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT NOMOR 7 Tahun 2018 TENTANG NAGARI	Tugas Kerapatan Adat Nagari	a. Mengawasi penyelenggaraan Pemerintahan Nagari b. Menyusun peraturan Nagari bersama Kapalo Nagari, c. Membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Nagari tentang Anggaran Pandapatan dan Belanja Nagari.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Referensi	Indikator	Sub Indikator
	Wewenang Kerapatan Adat Nagari	<ol style="list-style-type: none"> a. Memilih dan mengangkat Kapalo Nagari secara musyawarah dan mufakat, b. Menyalurkan aspirasi masyarakat Nagari, c. Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan adat istiadat dan budaya Nagari, d. Meminta pertanggungjawaban pelaksanaan Pemerintahan Nagari e. Melestarikan nilai-nilai adat dan budaya sesuai Adat Salingka Nagari

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB III

METODE PENELITIAN

Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian ini akan dilakukan dalam waktu mulai dari bulan November 2019 sampai Februari 2020 dan lokasi penelitian ini akan dilakukan di Nagari Panyakalan, Kecamatan Kubung, Kabupaten Solok, Provinsi Sumatera Barat.

Jenis Penelitian

Jenis Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Bodgan & Taylor dan Moelong (2007) mendefenisikan metode kualitatif sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati. Sementara itu penelitian deskriptif dijelaskan oleh Zuriah (2009) sebagai penelitian yang diarahkan memberikan gejala-gejala, fakta-fakta atau kejadian-kejadian secara sistematis dan akurat, mengenai sifat-sifat populasi atau daerah tertentu.

Sumber Data

Adapun data yang diperlukan dalam penelitian ini meliputi :

1. Data primer, berupa hasil wawancara dengan informan penelitian dan hasil penelusuran yang dilakukan langsung di lokasi penelitian yaitu; Pemerintahan Nagari Panyakalan, Kecamatan Kubung, Kabupaten Solok, Sumatera Barat.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Data Sekunder, umumnya berupa bukti, catatan atas laporan historis yang telah tersusun dalam arsip (data dokumenter) yang dipublikasikan dan tidak dipublikasikan. Data Sekunder ini yang digunakan dalam penelitian ini adalah data dalam bentuk jadi yaitu Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2018 tentang Nagari.

3.4 Informan Penelitian

Subjek penelitian adalah pihak yang mengetahui atau memberikan informasi maupun kelengkapan mengenai objek penelitian. Teknik pengambilan sampel dari Key Informan adalah dengan menggunakan teknik Purposive Sampling yakni diambil berdasarkan prioritas dan pertimbangan-pertimbangan tertentu. Penelitian menggunakan informasi penelitian melalui key informan yaitu:

Tabel 3.1 : Key Informan Penelitian

No	Informan	Jumlah
1	Kapala Nagari	1
2	Ketua KAN	1
3	Ketua BMN	1
	Jumlah	3

3.5 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data tersebut dilakukan dengan cara :

3.5.1 Pengamatan Langsung atau Observasi

Yaitu cara pengumpulan data yang dilakukan dengan pengamatan langsung terhadap objek yang diteliti. Dalam hal ini penulis secara langsung akan mengamati peranan kerapatan adat nagari Panyakalan dalam penyelenggaraan

pemerintahan otonom di pemerintahan nagari Panyakalan, Kecamatan Kubung, Kabupaten Solok, Sumatera Barat

3.5.2 Wawancara atau Interview

Yaitu cara pengumpulan data yang dilakukan dengan mengadakan proses komunikasi secara langsung dengan melakukan tanya jawab kepada responden seputar informasi yang diperlukan dalam penelitian ini.

3.5.3 Dokumentasi

Dokumentasi yaitu teknik pengumpulan data melalui bahan-bahan tertulis yang diterbitkan oleh lembaga-lembaga yang menjadi objek penelitian, baik berupa prosedur, peraturan, gambar, laporan hasil pekerja, serta berupa foto.

3.6 Analisis Data

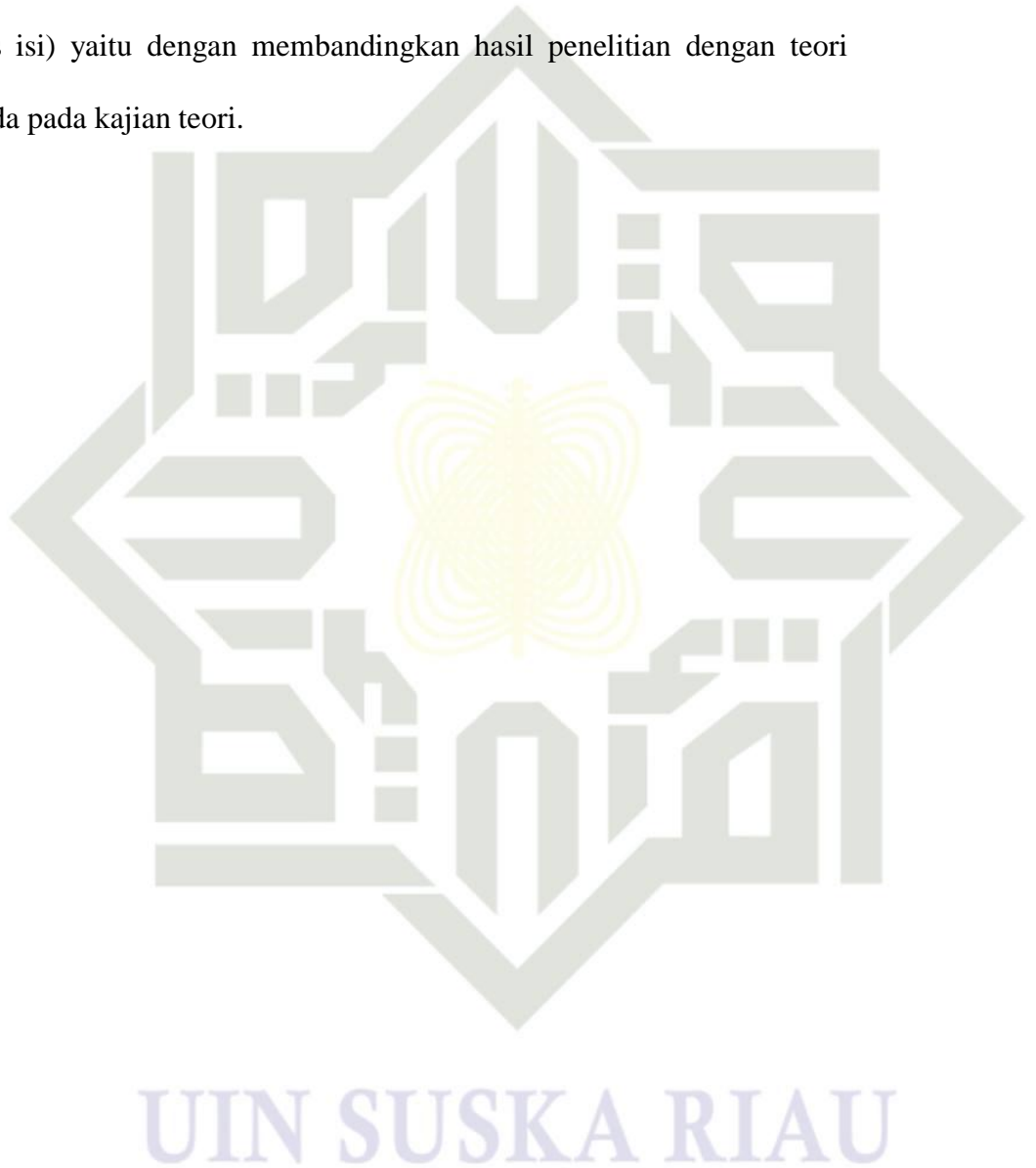
Aktivitas dalam pengolahan dan analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif yang terdiri dari empat langkah, yaitu :

1. Pengumpulan data, yaitu pengumpulan data berarti proses memasuki lingkungan penelitian dan melakukan pengumpulan data penelitian;
2. Reduksi data, yaitu mereduksi data berarti merangkum, memilih data yang pokok dan penting serta membuat kategorisasi. Dengan demikian data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang jelas sesuai dengan tujuan penelitian, dan mempermudah untuk melakukan pengumpulan selanjutnya;
3. Penyajian data, yaitu penyajian data dalam penelitian kualitatif bisa dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan dan hubungan antar kategori. Selanjutnya diuraikan dalam penyajian data, berupa teks narasi.

4. Penarikan kesimpulan/verifikasi, yaitu kesimpulan yang dikemukakan jika didukung oleh bukti-bukti yang valid dan konsisten saat penelitian maka kesimpulan yang dikemukakan merupakan kesimpulan yang kredibel. Penarikan kesimpulan yang dilakukan dengan content analysis (teknik analisis isi) yaitu dengan membandingkan hasil penelitian dengan teori yang ada pada kajian teori.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB IV

KETENTUAN UMUM

4.1. Kondisi Geografis Nagari Panyakalan

Panyakalan merupakan Nagari yang memiliki wilayah perbukitan yang memiliki topografi datar dan sedikit bergelombang. Secara keseluruhan wilayah Nagari Panyakalan jika dilihat dari ketinggian, rata-rata daerahnya berada pada ketinggian 450 m diatas permukaan laut. Berdasarkan rata-rata ketinggian daerah ini umumnya lingkungan alam Panyakalan identik dengan areal persawahan dan perbukitan (perladangan) sebagai daerah yang berada didaerah perbukitan Nagari . Panyakalan memiliki suhu rata-rata 37 derajat celcius.

Pembagian musim di daerah ini relative sama dengan pembagian musim yang berlangsung diwilayah Negara Indonesia lainnya yang dipengerahi 2 musim yaitu musim hujan dan kemarau, pengaruh musim ini juga berpegaruh terhadap kegiatan dan aktifitas masyarakat. Secara rinci dapat dilihat pada table berikut :

Tabel 4.1 : Geografis Nagari Panyakalan

No	Uraian
1	Luas wilayah : 15,63 Km²
2	Jumlah Jorong : 4 (empat)
3	Batas wilayah :
4	Topografi
5	Hidrologi :
6	Klimatologi :
7	Luas lahan pertanian
8	Luas lahan pemukiman : 363 Ha

Akses jalan kepanyakalan ada 3 yaitu dari arah pasar raya solok \pm 8 Km, dari pasar muaro paneh \pm 5 Km, dan dari jalan alahan panjang, sirukam.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

4.2. Sejarah Nagari

4.2.1. Asal-usul / Legenda Nagari

Mengenai asal usul nama nagari Panyakalan sendiri ada beberapa versi, yang pertama secara umum masyarakat meyakini bahwa nama nagari Panyakalan berarti “*panjangakalan*”, karena pada saat agresi belanda I dan II Panyakalan menjadi pusat gerilya, namun hebatnya Panyakalan tidak pernah dibakar oleh Belanda karena bagi Belanda bagi Pejuang yang tertangkap akan langsung di bawa Cubadak karena di Panyakalan terdapat Bukit Tambun Tulang (batas dengan Taruang-Taruang) dan Bukit Tali Jawi (di bawah bukit Gelanggang Setan), yang menjadi momok yang menakutkan bagi pasukan Belanda. Daerah ini juga pernah menjadi pusat perjuangan PRRI yang dipimpin oleh Letkol Ahmad Husein.

Versi lainnya tentang asal mula nagari Panyakalan berarti, “Panyaka di tampek nan kalam” artinya pada zaman dahulu Panyakalan menjadi pusat perampok-perampok besar sehingga orang-orang takut untuk datang ke daerah ini.

4.2.2. Sejarah Pemerintahan Nagari

Nama-nama Wali Nagari / Kepala Desa Nagari Panyakalan dari masa ke masa :

Tabel 4.2 : Sejarah Pemerintahan Nagari

No	Periode	Nama Wali Nagari	Keterangan
1	1968 s/d 1972	ZAINAL MUIN	-
2	1972 s/d 1977	ZAHARUDDIN	-
3	1977 s/d 1987	NZ. DT. RJ. NAN KAYO	2 (dua) periode
4	1887 s/d 1997	NZ. DT. RJ. NAN KAYO	Kepala Desa (2 periode)
4	1997 s/d 2002	N.DT.RJ.DIHULU	Kepala Desa
5	2002 s/d 2005	N.DT.RJ.DAHULU	-
6	2005 s/d 2007	HASRIZAL CHAND	Pjs

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

No	Periode	Nama Wali Nagari	Keterangan
7	2007 s/d 2011	HASRIZAL CHAND	-
8	2011 s/d 2016	MUSFAR	-
9	2016 s/d 2019	IRWAN EKA SASTRA, M.Pd	
10	2020 s/d	AGUS EVATRA DT.	

4.3. Gambaran Demografi Nagari Panyakalan

Masyarakat Nagari Payakalan yang luas wilayahnya 15,63 Km², dengan rincian jumlah penduduk 4.983 jiwa, dengan jumlah KK (Kepala Keluarga) 1.205 jiwa, Jumlah Laki – Laki 2 564. Jumlah Perempuan 2.419, dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 4.3 : Data Penduduk Nagari Panyakalan

Uraian	Jumlah
A. Jumlah Penduduk (Jiwa)	4.983
B. Jumlah KK	1.205
C. Jumlah laki-laki	2.564
D. Jumlah perempuan	2.419

4.4. Sistem Mata Pencaharian Masyarakat Nagari Panyakalan

Tabel 4.4 : Mata Pencaharian Masyarakat Nagari Panyakalan

Mata Pencaharian	Jumlah
A. BuruhTani	379
B. Petani	937
C. Pedagang	160
D. PNS	416
E. TNI/Polri	25
F. PerangkatNagari	10
G. Industrikecil	79
H. Lain-lain	2921

Mayoritas mata pencaharian penduduk adalah petani dan buruh tani. Hal ini disebabkan karena sudah turun temurun sejak dulu bahwa masyarakat adalah petani dan juga minimnya tingkat pendidikan menyebabkan masyarakat tidak

punya keahlian lain dan akhirnya tidak punya pilihan lain selain menjadi buruh tani. Hal itu juga didukung oleh lahan persawahan, perladangan dan perkebunan yang banyak dimiliki oleh masyarakat nagari panyakalan.

4.5. Agama dan Religi Masyarakat Nagari Panyakalan

Sebagai mayoritas masyarakatnya Minangkabau, maka Mayoritas penduduk di Nagari Panyakalan adalah islam yaitu 98,6%. Hanya masyarakat pendatang yang non-muslim. Nagari Panyakalan mempunyai 3 Masjid dan 12 Mushalla yang dimiliki di nagari panyakalan.

Tabel 4.5 : Data Agama Masyarakat Nagari Panyakalan

Agama	Jumlah
A. Islam	4.916
B. Kristen	58
C. Protestan	9
D. Katolik	-
E. Hindu	-
F. Budha	-

4.6. Suku Bangsa di Nagari Panyakalan

Mayoritas masyarakat di Nagari Panyakalan berasal dari suku bangsa Minangkabau, dan dan Minoritas beberapa masyarakat pendatang yang bersuku bangsa Jawa, Sunda, Batak, Nias, dan lain-lain. Berikut beberapa nama suku – suku yang ada di Masyarakat Minangkabau Nagari Panyakalan :

- Tanjung
- Balai Mansiang
- Supanjang
- Sungai Napa

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- e. Melayu
- f. Kuntiaiyie

4.7. Kesenian

Pada umumnya kesenian yang ada di nagari Panyakalan, sama dengan kesenian daerah lain di Minangkabau, seperti adanya kesenian Talempong, Rabab, Saluang, Seni Tari, yang biasanya pasti dipentaskan pada acara adat seperti Batagak Gala, Baralek, dll. Di Nagari Panyakalan juga mempunyai beberapa grup musik tradisional Minangkabau milik individu, dan juga telah ada Rumah Batik Minang yang banyak menghasilkan berbagai macam produk dari kesenian batik Minangkabau. Selain itu juga ada beberapa studio musik modern. Alat – alat musik tradisional yang ada di nagari Panyakalan merupakan milik suatu kaum atau suku, yang hanya digunakan pada acara tertentu yang bersifat adat.

4.8. Sistem Teknologi

Masyarakat Nagari Panyakalan dalam sistem Teknologi telah banyak kemajuan, bahkan sudah jarang menggunakan teknologi tradisional, sistem teknologi dalam komunikasi pada umumnya bahkan merata masing – masing individu telah menggunakan teknologi Handphone, bahkan anak-anak juga telah mempunyai 1 perangkat alat tersebut, selain itu hampir masyarakat nagari panyakalan juga telah banyak bisa mengoperasikan komputer dan internet, ini dibuktikan dengan adanya beberapa warnet (warung internet) di wilayah nagari panyakalan. Dalam transportasi masyarakat nagari panyakalan banyak menggunakan mobil dan motor pribadi, dan angkutan umum. Hal itu dilihat dari



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

angdes yang lewat di wilayah nagari panyakalan dan banyaknya ojek di persimpangan jalan di nagari panyakalan. Dalam pertanian teknologi modern juga telah digunakan oleh masyarakat nagari panyakalan, seperti rice milling, dibuktikan dengan adanya 3 huller rice milling di nagari panyakalan dengan kepemilikan pribadi, menggunakan mesin bajak dalam membajak sawah, tetapi juga ada yang menggunakan teknologi tradisional, seperti dengan Toang untuk malambuik/mahampeh padi, dan niru. Dan membajak sawah dengan kerbau, serta masih menggunakan cangkul.

4.9. Organisasi Sosial Masyarakat Nagari Panyakalan

Beberapa organisasi sosial masyarakat Nagari Panyakalan, yaitu perangkat Nagari, Jorong, BMN (Badan Musyawarah Nagari), KAN (Kerapatan Adat Nagari Panyakalan), Karang Taruna Nagari Panyakalan, PKK Nagari Panyakalan, PHBI (Panitia Hari Besar Islam) Nagari Panyakalan, selain itu juga terdapat kelompok arisan dan Julo-Julo baik berbentuk kelompok nagari, jorong, dan suku/kaum. Selain itu di bidang pertanian ada beberapa kelompok tani di nagari Panyakalan, Dan berada pada naungan Gabungan Kelompok Tani (GAPOKTAN) Nagari Panyakalan.

4.10. Peta Nagari Panyakalan

Gambar. 4.1
Peta Nagari Panyakalan



4.11. Sejarah Kerapatan Adat Nagari Panyakalan

Tahun 1952 KAN bernama “Lembaga”. Lumbago niniak mamak beranggotakan penghulu-penghulu Suku dibawah kelarasan Bodi Caniago (masa penjajahan) yang dipimpin oleh Damang dan Angku Palo. Waktu itu Ibu Kota Kab. Solok masih di Sawahlunto.

Pada tahun 1958 bernama DPRN (Dewan Permusyawaratan Rakyat Nagari). Dewan Permusyawaratan Rakyat Nagari ini beranggotakan seluruh Niniek

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Mamak pemangku adat dalam Nagari. Hal ini karena ada pengaruh politik dari masyarakat.

Pada tahun 1965 bernama KN (Kerapatan Nagari). Kerapatan Nagari terbentuk karena zaman pergolakan PRRI dan adanya pengaruh Muhammadiyah pelaksanaan adat yang disesuaikan dengan ajaran agama dan banyak pelaksanaan adat yang dihapuskan dan ada juga yang masih dikerjakan. Adat yang dihapuskan secara agama dengan persetujuan Ninik Mamak yaitu :

Mambilang hari

Maratok mayit

Makan minum dikubur

Mengharamkan dan dilarang minum tuak dan arak (air niro)

Dilarang judi barambuang

Dilarang sabuang ayam

Seluruh persoalan di Nagari diselesaikan oleh angku

Pada tahun 1970 KAN bernama Kerapatan Niniak Mamak. Pada waktu ini sudah banyak persoalan dan aturan-aturan di Nagari dibuat dan disepakati oleh niniek mamak sebagai berikut :

Perkara sako pusako

Pagang gadai

Amanah

Wasiat dan surat-surat tanah/sertifikat

UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dan akhirnya secara tidak langsung sudah berubah nama menjadi Kerapatan Adat Nagari (KAN) yang beranggotakan seluruh ninik mamak pemangku adat dalam nagari.

Pada tahun 1980 KAN sudah berjalan dan kerja sama dengan Pemerintahan Daerah (PEMDA) dan sudah ada organisasi (LKAAM). Dinagari KAN dibagi menjadi dua yaitu :pengurus KAN dan Anggota KAN. Pengurus KAN dipilih dari utusan suku termasuk tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh adat, parik paga suku dan tuo suku. Anggota KAN adalah seluruh ninik mamak ampek jiniah dalam suku dan pimpinan tigo suku tungkatan dan puncak.

4.12. Keanggotaan Kerapatan Adat Nagari Panyakalan

Keanggotaan Kerapatan Adat Nagari terdiri dari seluruh ninik mamak yang ampek jiniah dalam seluruh suku di Nagari. Yang termasuk ampek jiniah dalam suku yaitu : Penghulu, Manti, Dubalang dan Malin. Keanggotaan Kerapatan Adat Nagari Panyakalan Yaitu :

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

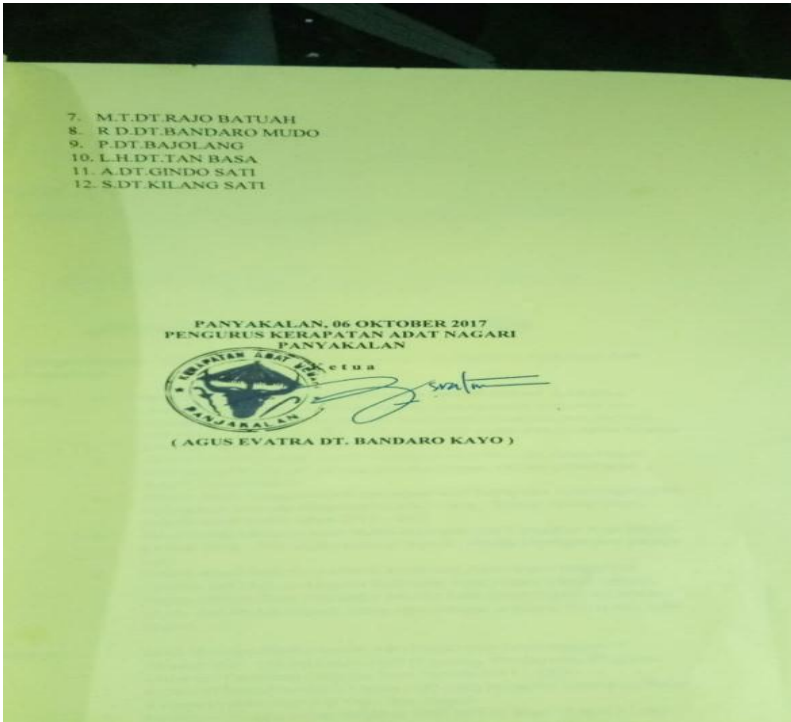
Gambar 4.2
Keanggotaan KAN

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KAN PANYAKALAN	
NOMOR	: REP.01/MUSY-KAN/NPYL/X-2017
TANGGAL	: 06 OKTOBER 2017
TENTANG	: SUSUNAN PENGURUS KERAPATAN ADAT NAGARI PANYAKALAN
E. DT. BANDARO KAYO	: KETUA
S.MALIN MALELO	: WAKIL KETUA
R.DT. BANDARO HITAM	: SEKRETARIS I
S. DT. SARI MARAJO	: SEKRETARIS II
A. DT.GUNUANG ACEH	: BENDAHARA
I. BIDANG URUSAN :	
PERDAMAIAN DAN PENYELESAIAN SENGKETA ADAT SAKO DAN PUSAKO	
- Gelar dan Jabatan Niniek Mamak.	
- Harta pusako tinggi, harta pusako rendah, harta suarang.	
1. P. DT. BANDARO SATI	
2. A. DT. PANJANG	
3. I. DT. SAMPONO BUJANG	
4. H.D. DT.TAN AMEH	
5. M. DT. SAMPONO ALAM	
6. WALI NAGARI PANYAKALAN	
7. H.M.MALIN JANIEH	
8. Z. DT. PANGULU KAYO	
9. S. DT. BAGINDO LANGIK	
10. M.KATIK SATI	
11. Y. DT. MAJO KAYO	
12. HJ.R.DT.RAJO GAMUYIANG	
II. BIDANG URUSAN :	
PELESTARIAN / PENGAWASAN TERHADAP PELANGGARAN HUKUM DAN PERATURAN ADAT Salingka Nagari :	
- Agama dan Pemerintahan Nagari.	
- Dalam penyelenggaraan Adat.	
Alek elok Alek buruek.	
1. Y. DT. BANDARO BASA	
2. E. DT. RAJO ALAM	
3. H.A.MALIN AMEH	
4. S.DT.BATUAH	
5. M.S.DT.BANGKAK MUDO	
6. F.DT.RAJO API	
7. S.GAJAH MALINTANG	
8. Y.I.DT.RAJO AMEH	
9. P.DT.GUNUANG BANDARO	
10. I.Y.DT.BANDARO PANJANG	

Gambar 4.3
Keanggotaan KAN

III. BIDANG URUSAN :	
PENGELOLAAN DAN PEMANFAATAN (TATA KELOLA) KEKAYAAN NAGARI SERTA PENINGKATAN PEREKONOMIAN MASYARAKAT NAGARI :	
1. S. DT. SATI	
2. P. DT. BUNGSU	
3. Y.DT.RAJO MANSUE	
4. H.S.DT.RAJO INTAN	
5. R.PAKIEH SATI	
6. E.S.DT.LUBUEK KAYO	
7. H.W.MALIN PARMATO	
8. I.MALIN SUTAN	
9. YARSISMAN	
10. TOM YULISNO	
11. J.S.DT.RAJO LENGANG	
12. I.G.DT.MANGKUTO SATI	
IV. BIDANG URUSAN :	
PENGEMBANGAN / PELESTARIAN BUDAYA DAN ADAT NAGARI :	
- Kesenian dan Permainan Anak Nagari	
- Situs dan sejarah nagari	
- Pidato, Pepatah – Petiti adat	
1. M. DT. RAJO SAMPONO	
2. H. DT. MALINTANG SATI	
3. A.J.DT. RAJO GUNUANG	
4. A.DT. SUTAN PANGERAN	
5. E.DT. TONGGAK BASA	
6. S.DT. SUTAN MALENGGANG	
7. S.DT. RAJO GEA	
8. S.DT. GINDO MALIN	
9. D.B.DT. SUTAN PAMUNCAK	
10. Y.H.DT. BANDARO ANGIN	
11. W.A.DT. BAGINDO MARAJO	
12. T.DT. SUTAN MANTARI	
V. BIDANG URUSAN :	
IDIOLOGI, POLITIK, EKONOMI, SOSIAL, BUDAYA, AGAMA DAN PEMERINTAHAN :	
- Hubungan Kerja sama dan Persoalan antar nagari	
- Dampak Teknologi	
- Penyakit Sosial masyarakat nagari	
1. Y. DT. PANJI ALAM	
2. A.N.DT. BANDARO PUTIEH	
3. S.MALIN BUNGSU	
4. H.G.DT. RAJO MAGEK	
5. D.R.DT. NAN BARANTAI	
6. A.MALIN MAINDO	

Gambar 4.4
Keanggotaan KAN



© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB VI

KESIMPULAN DAN SARAN

1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah penulis lakukan, maka pada bab ini penulis dapat mengambil kesimpulan bahwasanya Peran Kerapatan Adat Nagari (KAN) di Nagari Panyakalan Kecamatan Kubung Kabupaten Solok Provinsi Sumatera Barat berada pada kategori belum optimal.

Dikatakan belum optimal karena KAN dalam menjalankan tugas dan wewenang nya belum maksimal, bahkan ada tugas dan wewenang dari KAN belum terlaksana atau dijalankan. Yang faktor penyebab belum optimal nya Peran Kerapatan Adat Nagari di Nagari Panyakalan Kecamatan Kubung Kabupaten Solok Provinsi Sumatera Barat sebagai berikut :

1. Belum ada tindak lanjutnya dari Pemerintah Kab. Solok tentang Perda Sumbar No 7 Tahun 2018 Tentang Nagari

Untuk Perda Sumbar no 7 ini Pemerintah Kab.Solok belum ada tindak lanjutnya terhadap perda tersebut. Sehingga banyak lembaga-lembaga pemerintahan nagari yang tidak mengetahui bahkan tidak paham tentang Perda Sumbar no 7 tahun 2018 tentang Nagari.

2. Kurangnya anggaran APBNag ke lembaga KAN

Dalam rancangan APBNag anggara untuk lembaga KAN selalu ada, tetapi anggaran tersebut lebih banyak untuk kegiatan dari KAN. Anggaran untuk operasional harian KAN tidak ada dalam APBNag tersebut. Oleh sebab itu pelaksanaan tugas KAN tidak maksimal akibat dana operasional tidak ada.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Kurang nya pengetahuan lembaga KAN tentang Perda Sumbar No 7 tahun 2018 tentang Nagari.

Dampak dari belum ada tindak lanjut dari Pemerintah Kab. Solok mengenai Perda Sumbar No 7, lembaga KAN tidak mengetahui tugas dan wewenang nya. Sehingga tugas KAN yang dilaksanakan lebih banyak dalam adat padahal pada Perda Sumbar no 7 tahun 2018 tentang Nagari tugas KAN sudah banyak dalam penyelenggaraan pemerintahan.

4. Kurangnya kesadaran dari lembaga KAN untuk memaksimalkan perannya dalam penyelenggaraan pemerintahan
5. Kurangnya SDM yang dimiliki lembaga KAN sehingga menurunkan kinerja dari lembaga KAN dalam penyelenggaraan pemmerintahan.

Berdasarkan hasil penelitian diatas peneliti bias menyimpulkan bahwa peran KAN dalam Kenagarian lebih banyak dalam adat istiadat untuk dalam pemerintahan masih kurang dilakukan. Berdasarkan ungakapan masyarakat nagari Panyakalan peran KAN itu yaitu :

- a. Pelestarian dan menjaga kebudayaan/adat istiadat
- b. Penyelesaian masalah sengketa nagari
- c. Memberi surat izin nikah untuk anak nagari
- d. Pengawasan terhadap wali nagari

Saran

Adapun saran dari penulis untuk masukan bagi pihak yang bersangkutan adalah sebagai berikut :

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Diharapkan kepada lembaga KAN baik itu anggota ataupun ketua KAN untuk mampu memaksimalkan tugas dan wewenangnya didalam penyelenggaraan pemerintahan.
2. Diharapkan kepada Pemerintah Kab. Solok untuk cepat menindak lanjuti Perda Sumbar No 7 tahun 2018 tentang Nagari, agar lembaga-lembaga pemerintahan nagari dapat melaksanakan tugas nya dengan baik.
3. KAN bisa mengadakan pelatihan untuk keanggotaan KAN, agar KAN memiliki SDM yang baik dan mumpuni dalam bidang adat dan pemerintahan nagari.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

DAFTAR PUSTAKA

- Adhuri, Dedi Supriadi. (2002). *Antara Desa Dan Marga ; Pemilihan Struktur Pada Perilaku Elit Lokal Di Kabupaten Lahat, Sumatera Selatan*. ANTROPOLOGI INDONESIA. Volume 68. Hal : 1-12.
- Almasri. Muammar Alkadafi. 2018. *Administrasi Pemerintah Daerah Di Indonesia*. Pekanbaru : Cahaya Firdaus
- Astute, Nuraini Budi. (2010). *Kajian Historis Model Pemerintahan Lokal Terendah Di Sumatera Barat (Studi Kasus di Kenagarian IV Koto Pelembayan, Provinsi Sumatera Barat)*. EPP. Volume 7. Nomor 2. Hal : 31-39.
- Huda, Ni'matul. 2009. *Otomomi Daerah*. Pustaka Pelajar : Yogyakarta
- Maulizar, Sri. (2015). *Tuha Peut Dalam Pemerintahan Gampong Di Hagu Selatan Kota Lhokseumawe Tahun 2008-2014*. Jurnal POLITEIA. Volume 7. Nomor 2. Hal : 83-91.
- Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Nagari.
- Safitri, Lia, Ichsan Malik, Josephine R.M. (2018). *Nagari Sebagai Pranata Penyelesaian Konflik : Suatu Kajian Tentang Kerapatan Adat Nagari (KAN) Di Nagari Ketaping, Pariaman, Sumatera Barat*. Jurnal Pertahanan dan Bela Negara. Volume 8. Nomor 1. Hal : 147-170.
- Soekanto, Soerjono. Budi Sulistyowati. 2013. *Sosiologi Suatu Pengantar*. PT Rajagrafindo Persada : Jakarta
- Sugiman. (2018). *Pemerintahan Desa*. Binamulia Hukum. Volume 7. Nomor 1. Hal : 82-95.
- Syafiie, Inu Kencana, 2013, *Ilmu Pemerintahan*, PT. Bumi Aksara. Jakarta.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Desa.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.
- Widjaja, HAW, 2008, *Pennyelenggaraan Otonomi Di Indonesia Dalam Rangka Sosialisasi UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

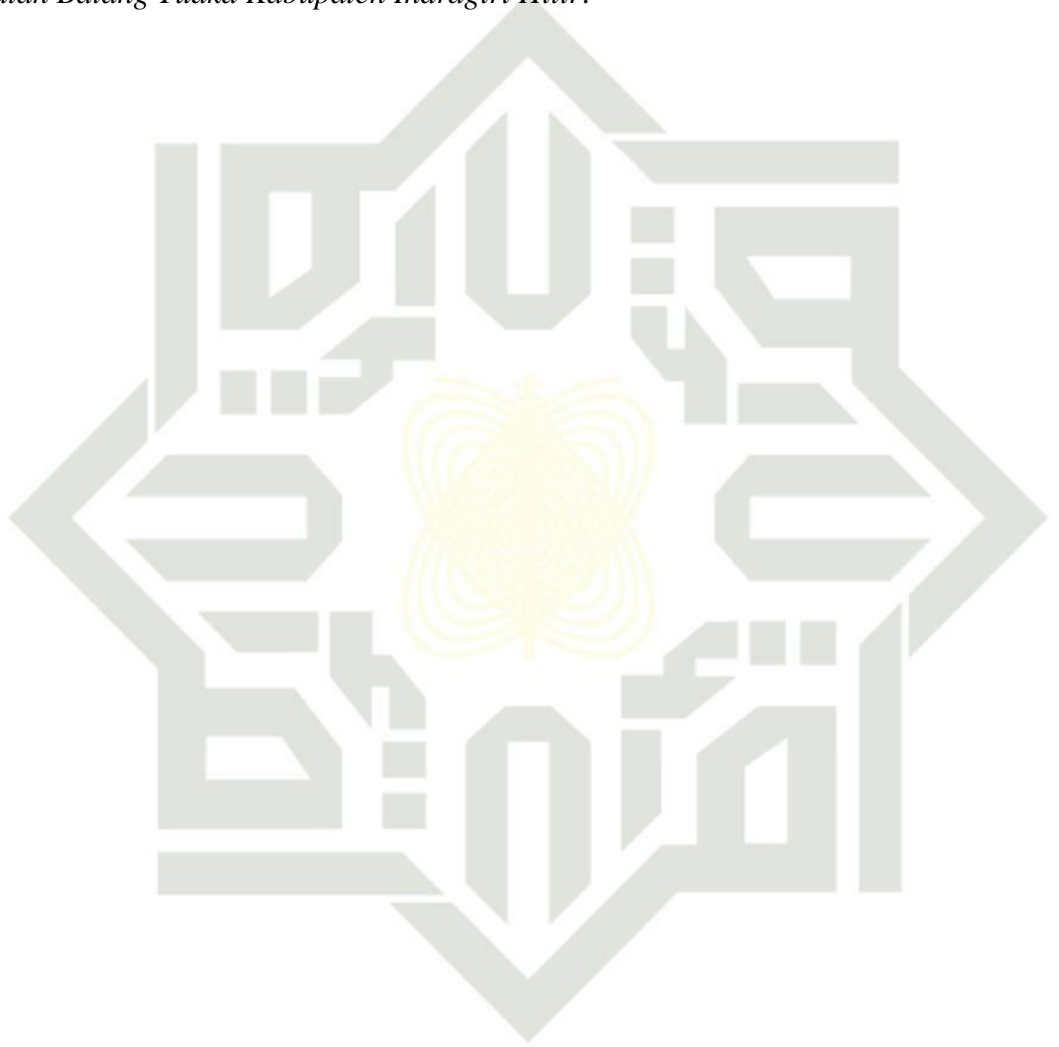


Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Yunus, Yusril. (2013). *Aktor Kultural Dalam Pemerintahan Terendah Di Sumatera Barat (Posisi Ninik Mamak Dalam Struktural Adat dan Penyelenggaraan Pemerintah Formal)*. Jurnal Humanus. Volume 12.Nomor 1.Hal : 21-32.

hairunnisa. 2019. *Peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Terhadap Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Di Desa Tanjung Siantar Kecamatan Batang Tuaka Kabupaten Indragiri Hilir*.



UIN SUSKA RIAU



PEDOMAN WAWANCARA

“Peran Kerapatan Adat Nagari Dalam Pemerintahan Otonom di Nagari Panyakalan Kecamatan Kubung Kabupaten Solok Provinsi Sumatera Barat”

No	Sub indikator	Nara Sumber	Pertanyaan
1	Pengawasan	Kerapatan Adat Nagari	Apakah bapak ada melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan nagari?
			Pengawasan seperti apa yang bapak lakukan terhadap penyelenggaraan pemerintahan nagari? Apakah pengawasan secara langsung atau pengawasan secara tidak langsung?
			Jika pengawasan langsung, pengawasan seperti apa yang bapak lakukan?
			Jika tidak langsung, pengawasan tidak langsung seperti apa yang bapak lakukan?
			Berapa kali bapak lakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan nagari?
		Wali Nagari	Apakah KAN ada melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan nagari dalam kepemimpinan bapak?
			Pengawasan seperti apa yang KAN lakukan terhadap penyelenggaraan pemerintahan nagari dalam kepemimpinan bapak?
	Penyusunan peraturan nagari	Kerapatan Adat Nagari	Apakah dalam penyusunan peraturan nagari Panyakalan bapak ikut terlibat didalamnya?
			Seperti apa keterlibatan bapak dalam penyusunan peraturan nagari? Apakah hanya sekedar menyusun, mengusulkan saja atau mensahkan peraturan tersebut juga?
		Wali Nagari dan Badan Musyawarah Nagari	Apakah dalam penyusunan peraturan nagari Panyakalan, KAN ada terlibat dalam penyusunanya?
			Seperti apa keterlibatan KAN dalam penyusunan peraturan nagari Panyakalan?

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

- Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
- Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Membahas dan menyepakati rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari	Kerapatan Adat Nagari	Apakah bapak ikut serta dalam membahas atau menyusun rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari Panyakalan?
		Apakah dalam menyepakati rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari bapak ikut serta didalamnya?
		Seperti apa peran bapak dalam membahas dan menyepakati rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari Panyakalan?
	Wali Nagari dan Badan Musyawarah Nagari	Apakah dalam membahas dan menyepakati rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari Panyakalan KAN ada terlibat didalamnya?
		Bagaimanakah keterlibatan KAN dalam membahas dan menyepakati rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari Panyakalan?
		Apakah dalam memilih dan mengangkat wali nagari bapak ada ikut serta didalamnya?
Memilih dan mengangkat kapalo nagari	Kerapatan Adat Nagari	Bagaimana keikutsertaan bapak dalam memilih dan mengangkat wali nagari? Apakah hanya ikut serta sebagai anggota musyawarah atau memimpin musyawarah?
		Seperti apa peran bapak dalam memilih dan mengangkat wali nagari?
		Bagaimana hak suara bapak atau anggota KAN lainnya dalam memilih dan mengangkat wali nagari?
		Apakah dalam memilih dan mengangkat wali nagari anggota KAN hadir semua? Dan semuanya memiliki hak suara?
		Jika dalam calon wali nagari nya dari Kerapatan Adat Nagari, bagaimana kah netralitas KAN/bapak didalam pemilihannya?



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

	Wali Nagari dan Badan Musyawarah Nagari	Apakah dalam memilih dan mengangkat wali nagari Panyakalan dilakukan secara musyawarah? Dan apakah KAN terlibat didalamnya?
		Bagaimana keterlibatan atau peran KAN dalam pemilihan dan mengangkat wali nagari di Panyakalan?
	Kerapatan Adat Nagari, Wali Nagari dan Badan Musyawarah Nagari	Bagaimanakah sistem pemilihan wali nagari Panyakalan dalam musyawarah? Apakah dengan voting atau lainnya?
Menyalurkan aspirasi masyarakat	Kerapatan Adat Nagari	Apakah bapak ada turun ke masyarakat untuk mendengarkan keluhan kesah dan aspirasi masyarakat?
		Dan apakah aspirasi masyarakat tersebut ada bapak salurkan ke pemerintahan nagari?
	Wali Nagari dan Badan Musyawarah Nagari	Berapa kali bapak turun ke masyarakat untuk mendengarkan aspirasi masyarakat?
		Apakah KAN ada menyampaikan aspirasi masyarakat kepada bapak?
Pengawasan pelaksanaan adat istiadat dan budaya nagari	Kerapatan Adat Nagari	Apakah bapak ada melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan adat istiadat dan budaya di nagari Panyakalan?
		Bagaimana kah bentuk pengawasan yang bapak lakukan terhadap pelaksanaan adat istiadat dan budaya di nagari Panyakalan?
		Berapa kali pengawasan terhadap pelaksanaan adat istiadat dan budaya di nagari Panyakalan?
		Jika terjadi permasalahan dalam adat istiadat di nagari Panyakalan ini, bagaimana penyelesaian yang bapak lakukan?

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

			Jika ada kegiatan adat istiadat atau budaya nagari panyakalan, apakah bapak hadir atau menyaksikan kegiatan tersebut?
Minta pertanggung jawaban pemerintahan nagari	Kerapatan Adat Nagari		Apakah bapak ada meminta laporan pertanggung jawaban pemerintahan nagari?
			Jika ada, bagaimana bapak menyikapi dari laporan tersebut?
	Wali Nagari		Apakah bapak ada menyerahkan laporan pertanggung jawaban bapak ke KAN atau KAN memintanya?
Pelestarian nilai-nilai adat dan budaya nagari	Kerapatan Adat Nagari		Apakah bapak ada melakukan pelestarian nilai-nilai adat dan budaya minang di nagari Panyakalan?
			Bagaimana cara bapak melakukan pelestarian nilai-nilai adat dan budaya minang di nagari panyakalan? Apakah dengan melakukan kegiatan atau lainnya?
			Berapa kali bapak melakukan pelestarian nilai-nilai adat dan budaya minang di nagari panyakalan?
	Wali Nagari		Apakah di nagari Panyakalan, KAN ada melakukan pelestarian nilai-nilai adat dan budaya minang?

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang



GUBERNUR SUMATERA BARAT

PERATURAN DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT NOMOR 7
TAHUN 2018

TENTANG NAGARI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA GUBERNUR
SUMATERA BARAT,

Menimbang: a. bahwa nagari sebagai kesatuan masyarakat hukum adat di Sumatera Barat memenuhi syarat untuk ditetapkan sebagai penyelenggara pemerintahan berdasarkan hukum adat sebagaimana dimaksud Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;

b. bahwa berdasarkan Pasal 109 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Pemerintah Provinsi berwenang menetapkan peraturan daerah sebagai pedoman bagi Kabupaten/Kota dalam menetapkan nagari sebagai penyelenggara pemerintahan berdasarkan hukum adat khususnya terkait dengan susunan kelembagaan, pengisian jabatan, dan masa jabatan kapalo nagari;

c. bahwa Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Nagari, tidak sesuai lagi dengan semangat penguatan nagari sebagai penyelenggara pemerintahan berdasarkan hukum adat;

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dan bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Nagari;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara

Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1646);

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan

Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang DanaDesa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2016 tentang Penetapan dan Penegasan Batas Desa;

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2016 tentang Kewenangan Desa;

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun

2016 tentang Laporan Kepala Desa;

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2017 tentang Penataan Desa;

13. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 6 Tahun 2008 tentang Tanah Ulayat dan Pemanfaatannya;

14. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 6 Tahun 2014 tentang Penguatan Lembaga Adat dan Pelestarian Nilai Budaya Minangkabau;



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI SUMATERA
BARAT

dan

GUBERNUR SUMATERA BARAT

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG NAGARI.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten/Kota adalah Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera

Barat.

2. Nagari adalah Kesatuan Masyarakat Hukum Adat secara geneologis dan historis, memiliki batas-batas dalam wilayah tertentu, memiliki harta kekayaan sendiri, berwenang memilih pemimpinnya secara musyawarah serta mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan filosofi dan sandi adat, *Adat Basandi Syara' – Syara' Basandi Kitabullah* dan/atau berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat dalam wilayah Provinsi Sumatera Barat.

Pemerintahan Nagari adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat Nagari dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pemerintah Nagari adalah Kapalo Nagari atau nama lainnya dibantu Perangkat Nagari sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Nagari.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

5. Kapalo Nagari atau yang disebut dengan nama lain adalah

Pemimpin Pemerintah Nagari.

Kerapatan Adat Nagari yang selanjutnya disingkat KAN atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang merupakan perwujudan permusyawaratan perwakilan tertinggi dalam penyelenggaraan Pemerintahan Nagari yang keanggotaannya terdiri

dari perwakilan ninik mamak dan unsur alim ulama Nagari, unsur cadiak pandai, unsur Bundo Kanduang, dan unsur parik paga dalam Nagari yang bersangkutan sesuai dengan adat salingka Nagari.

7. Jorong/Korong/Kampung adalah bagian dari wilayah Nagari.

8. Peradilan Adat Nagari atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga penyelesaian sengketa masyarakat di Nagari berdasarkan adat salingka Nagari yang bersifat mediasi;

9. Hukum Adat adalah hukum asli masyarakat yang bersumber dari peraturan hukum tidak tertulis, tumbuh dan berkembang serta dipertahankan dengan kesadaran hukum dalam memberikan keadilan bagi masyarakatnya secara turun-temurun, elastis dan dapat menyesuaikan diri dalam berbagai pertimbangan hukum;

10. Adat istiadat setempat adalah adat dan kebiasaan yang berlaku dalam kehidupan masyarakat Nagari.

11. Adat Salingka Nagari adalah adat yang berlaku dalam suatu Nagari sesuai dengan prinsip adat yang berlaku secara umum atau adat sebatang panjang dan diwarisi secara turun-temurun di Minangkabau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta dilindungi undang-undang
UIN SUSKA RIAU
State Islamic University of Sunan Kalijaga
Syarif Kasim Riau

12. Manti Nagari adalah Perangkat Pemerintah Nagari yang bertugas membantu Kapalo Nagari dalam penyelenggaraan dan pelaksanaan administrasi surat menyurat dan pembuatan laporan kinerja Nagari.

13. Bandaharo Nagari adalah Perangkat Pemerintah Nagari bertugas membantu Kapalo Nagari untuk melaksanakan keuangan, pembukuan serta pembuat laporan keuangan Nagari.

14. Dubalang Nagari adalah penjaga keamanan dan ketertiban Nagari.

15. Tungku Tigo Sajaringan adalah limbago atau unsur tempat kedudukan perwakilan masyarakat Nagari yang dapat dipilih dan memilih untuk pengisian jabatan dalam Kerapatan Adat Nagari, Pemerintah Nagari, dan Peradilan Nagari, yang terdiri atas Ninik Mamak, Alim Ulama, dan Cadiak Pandai.

16. Niniak Mamak adalah orang yang diangkat sebagai pangulu adat oleh suku/kaum dalam suatu Nagari.

17. Alim Ulama adalah anggota suku/kaum atau anggota masyarakat yang ahli dalam bidang agama islam atau ilmun agama Islam.

18. Cadiak Pandai adalah anggota suku/kaum atau anggota masyarakat yang ahli dalam bidang ilmu umum berbagai disiplin ilmu atau berilmu pengetahuan luas.

19. Parik paga dalam Nagari adalah unsur dari pemuda di Nagari yang berfungsi di bidang ketenteraman dan keamanan.

20. Bundo kanduang adalah pimpinan wanita/perempuan minangkabau yang menggambarkan sosok seorang perempuan bijaksana yang menjadikan adat minangkabau lestari dari masa ke masa.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pasal 2

Maksud ditetapkan Peraturan Daerah ini adalah sebagai pedoman bagi Kabupaten/Kota dalam pembentukan Nagari sebagai penyelenggara pemerintahan berdasarkan Hukum Adat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 3

Tujuan ditetapkan Peraturan Daerah ini adalah agar Nagari, sebagai Kesatuan Masyarakat Hukum Adat secara geneologis dan historis, memiliki batas-batas dalam wilayah tertentu, memiliki harta kekayaan sendiri, berwenang mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat serta memilih atau mengangkat pemimpinnya, mampu menyelenggarakan pemerintahan berdasarkan hak asal usul dan Hukum Adat.

Pasal 4

Ruang lingkup yang diatur dalam Peraturan Daerah ini meliputi susunan Kelembagaan Nagari, Pengisian Jabatan serta Masa Jabatan Kapalo Nagari, dalam penyelenggaraan Pemerintahan Nagari berdasarkan Hukum Adat.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB II KELEMBAGAAN NAGARI

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 5

Kelembagaan Nagari terdiri atas:

a. Kerapatan Adat Nagari; b. Pemerintah Nagari; dan c. Peradilan Adat Nagari.

Bagian Kedua

Kerapatan Adat Nagari

Pasal 6

(1) Pada setiap Nagari dibentuk Kerapatan Adat Nagari sebagai lembaga permusyawaratan tertinggi dalam penyelenggaraan Pemerintahan Nagari.

(2) Kerapatan Adat Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) keanggotaannya terdiri dari perwakilan Niniak Mamak dan unsur Alim Ulama Nagari, unsur Cadiak Pandai, unsur Bundo Kandung, dan unsur Parik paga dalam Nagari yang bersangkutan sesuai dengan Adat Salingka Nagari.

(3) Kerapatan Adat Nagari dipimpin oleh seorang ketua dan dibantu oleh 2 (dua) orang wakil ketua yang diangkat atau dipilih dari dan oleh anggota menurut ketentuan Adat Salingka Nagari.

(4) Pembentukan, pemilihan atau pengangkatan anggota, ketua dan wakil ketua Kerapatan Adat Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) diatur dengan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota sesuai dengan Adat Salingka Nagari.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta dilindungi undang-undang
UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Pasal 7

Kerapatan Adat Nagari mempunyai tugas sebagai berikut :

- a. mengawasi penyelenggaraan Pemerintahan Nagari oleh Kapalo Nagari;
- b. menyusun peraturan Nagari bersama Kapalo Nagari; dan
- c. membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Nagari tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari.

Kerapatan Adat Nagari mempunyai wewenang sebagai berikut

- a. memilih dan mengangkat Kapalo Nagari secara musyawarah dan mufakat;
- b. menyalurkan aspirasi masyarakat Nagari;
- c. melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan adat istiadat dan budaya Nagari;
- d. meminta pertanggungjawaban pelaksanaan Pemerintahan Nagari kepada Kapalo Nagari; dan
- e. melestarikan nilai-nilai adat dan budaya sesuai Adat Salingka Nagari.

Pasal 8

Masa Jabatan Kerapatan Adat Nagari ditentukan berdasarkan Adat

Salingka Nagari.

Dalam hal Adat Salingka Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak menentukan masa jabatan Kerapatan Adat Nagari, maka masa jabatan Kerapatan Adat Nagari ditetapkan selama 6 (enam) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 2 (dua) kali masa jabatan.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Bagian Ketiga Pemerintah Nagari

Pasal 9

Pada setiap Nagari dibentuk Pemerintah Nagari sebagai penyelenggara Pemerintahan Nagari bersama Kerapatan Adat Nagari.

Pemerintah Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kapalo Nagari dan dibantu oleh perangkat Nagari.

Pasal 10

Kapalo Nagari mempunyai tugas menyelenggarakan pemerintahan, melaksanakan pembangunan, pelayanan publik, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat Nagari.

Pasal 11

Kapalo Nagari mempunyai wewenang:

- memimpin penyelenggaraan Pemerintahan Nagari;
- mengangkat dan memberhentikan Perangkat Nagari;
- memegang kekuasaan pengelolaan keuangan dan asset Nagari;
- menetapkan Peraturan Nagari;
- menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari;
- membina kehidupan masyarakat Nagari;
- membina ketenteraman dan ketertiban masyarakat; dan
- membina, melestarikan dan mengembangkan kehidupan sosial budaya dan adat istiadat masyarakat Nagari.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta (Hak Milik) UIN Suska Riau
Sultan Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Pasal 12

Kapalo Nagari dipilih atau diangkat oleh Kerapatan Adat Nagari berdasarkan musyawarah mufakat.

(2) Tata cara pemilihan atau pengangkatan Kapalo Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.

Pasal 13

(1) Masa Jabatan Kapalo Nagari ditentukan berdasarkan Adat Salingka Nagari.

(2) Dalam hal Adat Salingka Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak menentukan masa jabatan Kapalo Nagari, maka masa jabatan Kapalo Nagari ditetapkan selama 6 (enam) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 2(dua) kali masa jabatan.

Pasal 14

(1) Perangkat Nagari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2)

terdiri atas:

- a. Manti Nagari, dibantu oleh Kapalo Urusan;
- b. Bandaharo Nagari;

UIN SUSKA RIAU



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta ini dilindungi Undang-Undang UIN Suska Riau

Dubalang Nagari; dan

Kapalo Jorong/Korong/Kampung.

(2) Manti Nagari bertugas membantu Kapalo Nagari untuk melaksanakan administrasi surat-menyurat, penyimpanan arsip dan pembuatan laporan kegiatan Pemerintahan Nagari.

(3) Bandaharo Nagari bertugas membantu Kapalo Nagari untuk melaksanakan administrasi keuangan, pembukuan serta pembuatan laporan keuangan.

(4) Dubalang Nagari bertugas menjaga keamanan dan ketertiban di Nagari.

(5) Kapalo Jorong/Korong/Kampung bertugas membantu Kapalo

Nagari sebagai pelaksana teknis di jorong/korong/kampung.

Bagian Keempat Peradilan Adat Nagari

Pasal 15

(1) Pada setiap Nagari, Kerapatan Adat Nagari membentuk Peradilan Adat Nagari sebagai lembaga penyelesaian sengketa masyarakat tertinggi di Nagari sesuai adat salingka Nagari.

(2) Sebelum sengketa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselesaikan oleh Peradilan Adat Nagari, harus diselesaikan terlebih dahulu pada tingkat keluarga, *paruik*, kaum dan/atau suku secara *bajanjang naiak batango turun*.

(3) Peradilan Adat Nagari sebagaimana dimaksud pada



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ayat (1)

mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. menyelesaikan sengketa sako dan pusako secara *bajanjang naiak batanggo turun* melalui proses perdamaian;
- b. penyelesaian perkara perdata adat melalui musyawarah dan mufakat berdasarkan kesepakatan dalam sidang majelis Kerapatan Adat Nagari yang merupakan “kato putuih” untuk dipedomani oleh lembaga peradilan ; dan
- c. memberi sanksi adat kepada anggota masyarakat yang melanggar Hukum Adat sesuai dengan ketentuan Adat Salingka Nagari.

Pasal 16

- (1) Peradilan Adat Nagari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) dipimpin oleh seorang ketua dan dibantu oleh seorang manti, dan beberapa orang hakim peradilan Adat Nagari.
- (2) Pedoman, susunan, pengangkatan dan pemberhentian, masa jabatan Hakim Peradilan Adat Nagari serta pembiayaan Peradilan Adat Nagari diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB III

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN Pasal 17

Gubernur melakukan pembinaan dan pengawasan umum terhadap

Nagari dalam penyelenggaraan pemerintahan berdasarkan Hukum

Adat.

Pasal 18

(1) Pembinaan terhadap Nagari sebagaimana dimaksud dalam Pasal

17 dilaksanakan oleh Organisasi Perangkat Daerah Provinsi

Sumatera Barat sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

(2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk peningkatan kapasitas bagi kelembagaan Nagari dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya masing-masing.

Pasal 19

(1) Dalam rangka pembinaan Nagari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, Gubernur dapat membentuk Dewan Pembinaan dan Pengembangan Nagari di tingkat Provinsi dan oleh Bupati/Walikota pada tingkat Kabupaten/Kota;

(2) Anggota Dewan Pembinaan dan Pengembangan Nagari terdiri atas unsur Ninik Mamak, Alim Ulama, Cadiak Pandai, Perguruan Tinggi, dan Lembaga Swadaya Masyarakat.

Pasal 20

Pemerintah Kabupaten/Kota melalui Organisasi Perangkat Daerah terkait wajib menyampaikan laporan penyelenggaraan Nagari kepada Gubernur.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak Cipta Milik UIN Suska Riau
Sate Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

(2) Laporan penyelenggaraan Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan secara berkala, paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

Pasal 21

Pengawasan dan evaluasi terhadap penyelenggaraan Nagari di Kabupaten/Kota dilakukan oleh Gubernur sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 22

Penyelenggaraan Nagari dan tata kelola sumberdaya Nagari berdasarkan Hukum Adat diatur dengan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.

Pasal 23

Pembentukan Desa Adat di Kabupaten Kepulauan Mentawai diatur dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 24

Penyelenggaraan Pemerintahan Nagari yang sudah berlangsung, tetap menjalankan tugas pemerintahannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

(2) Kabupaten/Kota yang mengubah status penyelenggaraan Pemerintahan Nagari menjadi Pemerintahan Nagari berdasarkan Hukum Adat, menindaklanjutinya dengan pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota tentang Nagari



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

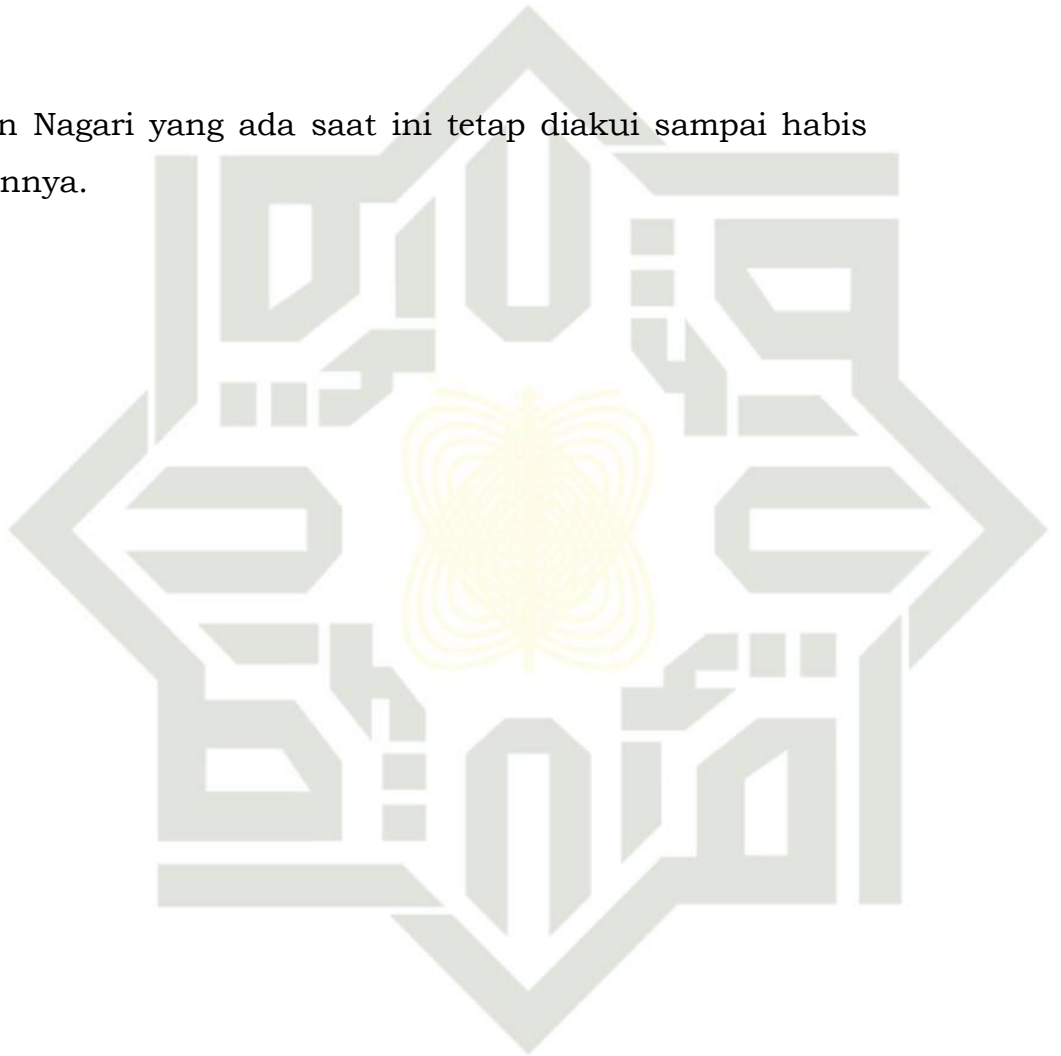
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dengan mempedomani Peraturan Daerah ini dan disesuaikan dengan Adat Salingka Nagari.

(c) Penyebutan nama Nagari yang menyelenggarakan pemerintahan berdasarkan hukum adat dikembalikan kepada nama aslinya.

Pasal 25

Kelembagaan Nagari yang ada saat ini tetap diakui sampai habis masa jabatannya.



UIN SUSKA RIAU



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB VI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 26

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 2 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Nagari, (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2007 Nomor 2) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 27

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat.

Ditetapkan di Padang pada tanggal 5 April 2018
GUBERNUR SUMATERA BARAT, ttd

IRWAN PRAYITNO

Diundangkan di Padang pada tanggal 5 April 2018
SEKRETARIS DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT

Ttd

ALIASMAR

LEMBARAN DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT TAHUN 2018
NOMOR 7

LOREG PERATURAN DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT :
(89/2018)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

LAMPIRAN DOKUMENTASI



Gambar 01
Dokumentasi bersama Bapak Syafrawal, S.Sos selaku Pj. Wali Nagari Panyakalan pada wawancara.



Gambar 02
Dokumentasi bersama Bapak Agus Evatra Dt. Bandaro Kayo selaku Ketua Kerapatan Adat Nagari Panyakalan pada wawancara

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Gambar 03

Dokumentasi Kerja Bakti yang dilakukan pemerintahan nagari Panyakalan bersama masyarakat untuk memperbaiki pengairan di nagari Panyakalan



Gambar 04

Dokementasi Balai Adat KAN Nagari Panyakalan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Gambar 05
Dokumentasi Kantor Wali Nagari Panyakalan



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
FAKULTAS EKONOMI DAN ILMU SOSIAL
كلية العلوم الاقتصادية و الاجتماعية
FACULTY OF ECONOMICS AND SOCIAL SCIENCES

Jl. H. R. Soebrantas No. 155 Km. 15 Tuahmadani Tampan - Pekanbaru 28293 PO Box 1400 Telp. 0761-562051
 Fax. 0761-562052 Web. www.uin-suska.ac.id, E-mail : fekonsos@uin-suska.ac.id

Nomor : Un.04/F.VII/PP.00.9/7505/2019
 Sifat : Biasa
 Lampiran : -
 Hal : Izin Riset

Pekanbaru, 10 Desember 2019 M
 13 Rabiul Akhir 1441 H

Kepada
 Yth. Kepala Kantor
 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
 Kabupaten Solok
 di Tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dengan hormat, disampaikan bahwa salah seorang Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau :

Nama : Nofran Wahyuda Putera
 NIM. : 11675101397
 Jurusan : Administrasi Negara
 Semester : VII (Tujuh)

bermaksud mengadakan **Riset** dalam rangka penulisan skripsi yang berjudul:
"Peran Kerapatan Adat Nagari dalam Pemerintahan Otonom di Nagari Panyakalan Kecamatan Kubung Kabupaten Solok Provinsi Sumatera Barat"
 Untuk itu kami mohon kiranya Saudara berkenan memberikan bantuan yang diperlukan kepada mahasiswa tersebut.

Demikianlah, atas bantuan dan kerjasama Saudara diucapkan terima kasih.



Dr. Drs. H. Muh. Said HM, M.Ag, MMt
 NIP. 19620512 198903 1 003

UIN SUSKA RIAU



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



PEMERINTAH KABUPATEN SOLOK DINAS PENANAMAN MODAL PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN TENAGA KERJA

Kompleks Perkantoran Pemerintah Kabupaten Solok
Jalan Raya Solok-Padang Km. 20 Arosuka Kode Pos 27364 Provinsi Sumatera Barat
Telepon/Fax (0755) 31447

Nomor : 070/015/PP/DPMPSTSPNAKER/I-2020 Arosuka, 09 Januari 2020
Kepada,
Lampiran : -
Perihal : *Izin Penelitian* Yth. Sdr. Wali Nagari Panyakalan

di
Tempat

Berdasarkan Surat dari Dekan Fakultas Ekonomi Dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau Nomor: Un.04/F.VII/PP.00.9/7505/2019 Tanggal 10 Desember 2019, bersama ini kami terbitkan Izin Penelitian atas nama:

Nama : NOFRAN WAHYUDA PUTERA
Tempat / Tgl. Lahir : Pakan Sabtu / 25 Desember 1997
Alamat : Jor. Hilia Banda Nag. Panyakalan Kec. Kubung
Nomor Identitas : 1302102211970002
Judul Penelitian : " Peran Kerapatan Adat Nagari dalam Pemerintahan Otonom Di Nagari Panyakalan Kecamatan Kubung Kabupaten Solok Provinsi Sumatera Barat "
Lokasi Penelitian : Nagari Panyakalan
Waktu Penelitian : 09 Januari 2020 s/d 09 Februari 2020

Dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Tidak boleh menyimpang dari maksud sebagaimana tersebut di atas.
2. Memberitahukan kedatangan serta maksud Penelitian dilaksanakan dengan menunjukkan surat keterangan yang berhubungan dengan itu, kepada Pimpinan Instansi setelah tiba ditempat yang dituju dan **melaporkan diri** sebelum meninggalkan daerah Penelitian kepada Pimpinan Instansi dan Bupati Solok.
3. Mematuhi semua peraturan yang berlaku.
4. Mengirim hasil Penelitian sebanyak 1 (satu) eksemplar kepada Bupati Solok Cq. Dinas Penanaman Modal, **PTSP dan Tenaga Kerja**.
5. Bila terjadi suatu penyimpangan / pelanggaran terhadap ketentuan tersebut di atas, maka Izin Penelitian ini akan dicabut kembali.

Demikianlah Izin Penelitian diberikan untuk dapat dipergunakan seperlunya.

A.n KEPALA
SEKRETARIS

MARCOS SOPHAN, S. Pt
NIP. 19740314 199903 1 006

Tembusan :

1. Yth. Bapak Bupati Solokdi Arosuka (sebagai laporan)
2. Yth. Sdr. Kepala Kantor Kesbang Pol Kab. Solok
3. Yth. Sdr. Camat Kubung di Tempat
4. Yth. Sdr. Dekan Fakultas Ekonomi Dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim di Riau

UIN SUSKA RIAU



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



PEMERINTAH KABUPATEN SOLOK
KECAMATAN KUBUNG
NAGARI PANYAKALAN

Jalan Raya Solok- Alahan Panjang No : Kode Nagari 07 Telp (0755) 21544

SURAT KETERANGAN
Nomor : 14/ 1.2.4.18/ 07/ II-2020

Yang bertanda tangan dibawah ini : Wali Nagari Panyakalan, Kecamatan Kubung Kabupaten Solok, dengan ini menerangkan bahwa :

Nama	: NOFRAN WAHYUDA PUTERA
Tempat/ Tgl Lahir	: Pakan Sabtu, 22-11-1997
NIK	: 1302102211970002
Pekerjaan	: Mahasiswa UIN Sultan Syarif Kasim Riau
	Prodi Ilmu Administrasi Negara
	: Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial
Alamat	: Jorong Hilie Banda Nagari Panyakalan
	: Kec. Kubung Kab. Solok

Yang tersebut namanya diatas, benar telah selesai melakukan Penelitian Akademis dan Pengambilan Data untuk keperluan Penulisan Skripsi dengan judul **“PERAN KERAPATAN ADAT NAGARI DALAM PEMERINTAHAN OTONOM DI NAGARI PANYAKALAN KECAMATAN KUBUNG KABUPATEN SOLOK PROVINSI SUMATERA BARAT”**.

Demikianlah Surat Keterangan ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Panyakalan, 27 Februari 2020



WALI NAGARI PANYAKALAN

AGUS EVATRA DT. BANDARO KAYO

UIN SUSKA RIAU



RIWAYAT HIDUP PENULIS

Nofran Wahyuda Putera lahir di Panyakalan, 22 November 1997. Merupakan anak ke dua dari dua bersaudara dari Bapak Syamsul Huda dan Ibu Yusnawati. Penulis menyelesaikan pendidikan formal di Sekolah Dasar Negeri 06 Panyakalan dan tamat pada tahun 2010. Dilanjutkan dengan menyelesaikan pendidikan di MTS M Panyakalan dan tamat pada tahun 2013. Dilanjutkan dengan menyelesaikan pendidikan di SMA Negeri 2 Kota Solok dan tamat pada tahun 2016. Setelah menyelesaikan jenjang SMA penulis melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. Jurusan Administrasi Negara (S1) Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial pada tahun 2016.

Pada tahun 2019 penulis melakukan Praktek Kerja Lapangan (PKL) di Kantor Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Jalan Pepaya, Pekanbaru. Kemudian pada tahun yang sama penulis melaksanakan Kuliah Kerja Nyata (kukerta) di Desa Sungai Siput, Kecamatan Siak Kecil, Kabupaten Bengkalis Riau.

Berkat Karunia dan Rahmat Allah SWT, penulis mengikuti ujian munaqasyah pada tanggal 20 Juli 2020 dengan judul Skripsi “*Peran Kerapatan Alat Nagari Dalam Pemerintahan Otonom Di Nagari Panyakalan Kecamatan Kubung Kabupaten Solok Provinsi Sumatera Barat*”, dan dinyatakan lulus dengan predikat memuaskan dan berhak menyandang gelar Sarjana Sosial (S.sos).

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.